

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2021 - 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.

Penyusunan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan isu strategis dan pencapaian visi misi Walikota Bontang. Diharapkan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan sebagai pedoman perencanaan di Lima Tahun mendatang selama periode 2021 – 2026, sehingga mewujudkan pelayanan yang lebih terarah dan lebih baik kepada masyarakat, khususnya Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 ini mungkin masih terdapat kesalahan dan ketidaksempurnaan untuk itu kami mohon maaf yang sebesar besarnya dan semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang

Bontang, 24 Nopember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Drs. ASDAR IBRAHIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196708201998031008

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah …………………. 2

1.3 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2

1.4 Landasan Hukum 4

1.5 Maksud dan Tujuan 6

1.6 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 9

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 18

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 38

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi permasalahan 40

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 42

3.3 Telaahan Renstra K/L 45

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 47

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 48

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .......................................................................... 61

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program 64

6.2 Kegiatan 67

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Indikator Kinerja 78

7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP 79

BAB VIII PENUTUP 83

**LAMPIRAN**

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA BONTANG TAHUN 2021-2026 (RPJMD)

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Daftar Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Status Kepegawaian 19

Tabel 2.2 Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 19

Tabel 2.3 Daftar Rincian Aset DPMPTSP Tahun 2016 – 2021 ………………… 20

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP tahun 2016-2021 29

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Tahun 2016-2020 30

Tabel 2.6 Indikator SIPD Data Kinerja Urusan Tahun 2015 – 2020 ……… 31

Tabel 2.7 Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2016 – 2020… 32

Tabel 2.8 Perkembangan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 35

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP. 41

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 44

Tabel 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 46

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021 – 2026 49

Tabel 4.2 Rumusan terkait informasi perhitungan Capaian Sasaran 50

Tabel 4.3 Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2018 – 2020 51

Tabel 4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya 51

Tabel 4.5 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra 52

Tabel 4.6 Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja 53

Tabel 4.7 Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2018 – 2020 54

Tabel 4.8 Perbandingan Realisasi Nilai IKM Tahun 2020 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya 55

Tabel 5.1 Visi dan Misi DPMPTSP Kota Bontang 62

Tabel 6.1 Rencana program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMPTSP 2021 – 2026 71

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Bontang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026 80

Tabel 7.2 Target Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Bontang Tahun 2021-2026….. 81

Tabel 7.3 Pengukuran Indikator - Indikator Kinerja 82

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bontang Tahun 2021 -2026 (RPJMD) ……………..……………………………. 86

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kota Bontang dengan RPJMD Provinsi Kaltim dan RPJM Nasional 3

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP 10

Gambar 2.2 Grafik Realisasi Perizinan Periode 2016 – 2020 31

Gambar 2.3 Grafik Nilai Realisasi Investasi PMDN Tahun 2016-2020 33

Gambar 2.4 Grafik Nilai Realisasi Investasi PMA Tahun 2016-2020 33

Gambar 2.5 Grafik Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2016 sampai dengan 2020 34

Gambar 2.6 Grafik Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2016 sampai dengan 2020 34

Gambar 2.7 Grafik Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 36

Gambar 4.1 Gambar CASCADDING DPMPTSP 56

Gambar 4.2 Penjabaran Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Periode 2021 – 2026 58

Gambar 4.3 Penjabaran Misi Ke-2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Periode 2021 – 2026 59

Gambar 4.4 Peta Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang 60

# BAB Ilogobontang1

# PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Pemerintah Kota Bontang dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah memerlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk (guidance), penentu arah, sasaran dan tujuan, serta bagaimana pemerintahan dan pembangunan akan dilakukan, maka disusunlah rencana strategis untuk memenuhi keperluan tersebut. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah pada perangkat daerah.

Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi, sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di daerah maupun nasional. Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dan mengacu pada RPJMD Daerah untuk jangka waktu lima tahunan.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Perencanaan strategis harus dilaksanakan secara selaras, seimbang, dan komprehensif namun tetap memiliki prioritas-prioritas dalam pelaksanaannya karena setiap komponen dalam renstra memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lain.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dengan sumber daya yang ada menyusun rencana strategis untuk Lima tahun mendatang dalam periode tahun 2021-2026.

**1.2 Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah**

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah ditentukan oleh sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai oleh satuan kerja perangkat daerah, dengan adanya Rencana Strategis dari Perangkat daerah diharapkan menjadi langkah awal untuk memberikan komitmen pemerintah pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang dengan pengumpulan informasi secara menyeluruh dan menyiapkan analisis atas berbagai implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

**1.3 Keterkaitan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Keterkaitan antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dengan Dokumen lainnya, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut:

* 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kota Bontang dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi serta memuat

arah kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program kewilayahan.

* 1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bontang yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pembangunan daerah Provinsi, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan pihak swasta.

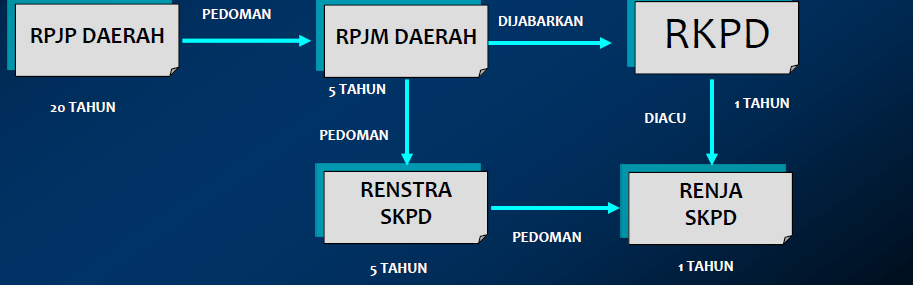
Berdasarkan hal tersebut diatas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang pada prinsipnya tetap berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang.



**Provinsi Kalimantan Timur**



**Kota Bontang**



**Gambar 1.1**

**Hubungan RPJMD Kota Bontang dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJM Nasional**

**1.4. Landasan Hukum**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yaitu :

* 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko secara Elektronik;
  17. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal;
  18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025;
  19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019–2039;
  20. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021 – 2026; serta
  21. Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  22. **Maksud dan Tujuan**

**1.5.1 Maksud**

Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang adalah sebagai pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selama kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2021 – 2026 yang mengintegrasikan program-program internal serta menjadi dasar bagi penyusunan cascading program-program lintas sektoral guna menunjang pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

**1.5.2 Tujuan**

Sedangkan tujuan pernyusunan perencanaan strategis ini adalah untuk menentukan strategi arah kebijakan, agenda, dan sasaran melalui program pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara bertahap, terencana dan berkelanjutan.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Periode 2021 – 2026 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. Adapun Sistematika Penulisannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

BAB ini memuat penjelasan secara ringkas tentang Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Periode 2021 - 2026.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

BAB ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian kinerja pelayanan dpmptsp dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelyanan dpmptsp.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

BAB ini menguraikan permasalahan yang mempengaruhi pelayanan dpmptsp sehingga diperoleh informasi tentang isu-isu strategis apa saja yang akan ditangani melalui rencana strategis (RENSTRA) dpmptsp.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

BAB ini membahas mengenai rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

BAB ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menjelaskan tentang rencana progam dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja dpmptsp secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

** BAB II **

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan susunan organisasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas membawahkan:

a. Sekretariat

b. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

c. Bidang Penanaman Modal

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sekretariat, membawahkan:
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahkan:
5. Seksi Pelayanan Perijinan dan Nonperizinan Ekonomi
6. Seksi Pelayanan Perijinan dan Nonperizinan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Perijinan dan Nonperizinan Kesra dan Lingkungan
8. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
   1. Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal
   2. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   3. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal
9. Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahkan:
   1. Seksi Pengaduan, Pengendalian, dan Informasi Layanan
   2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
   3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

**Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut :**

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi**

Adapun tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, adalah sebagai berikut :

**1. Kepala dinas**

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin dan menyelengarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas kepala dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

* + 1. Perencanaan program dan kegiatan DPMPTSP;
    2. Pengendalian dan pengorganisasian pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP;
    3. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
    4. Penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja DPMPTSP; serta
    6. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi kepala DPMPTSP.

**2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai dengn prosedur dalam rangka medukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, dalam melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program kerja dan kegiatan Sekretariat;
2. Pengoordinasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja sekretariat; serta
5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi sekretaris.

**3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung kelancaran tugas organisasi, merupakan tugas dari Kasubbag. Umum dan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugas tersebut Kasubbag. Umum dan kepegawaian melaksanakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Pengoordinasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan internal kantor;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
6. Pelaksanaan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; serta
8. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi sub bagian umum dan kepegawaian.

**4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kasubbag, Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan;
2. Pengoordinasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Pelaksanaan urusan perencanaan;
4. Pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan;
5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan program dan keuangan; serta
6. Pelaksanaan fungsi ini terkait dengan tugas dan fungsi sub bagian perencanaan dan keuangan.

**5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pelayanan perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program kerja bidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
2. Pengoordinasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Penyelenggaraan urusan perizinan dan nonperizinan;
4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan; serta
5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan, dan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan. Secara hirarki dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi, adalah sebagai berikut:

**5.1 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi**

Kepala seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan ekonomi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan Perencanaan kegiatan seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan ekonomi dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

* + - 1. Perencanaan kegiatan seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan ekonomi;
      2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
      3. Pelaksanaan urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan ekonomi;
      4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan ekonomi; serta
      5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan ekonomi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**5.2 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan**

Kepala seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

* + - 1. Perencanaan kegiatan seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan pembangunan;
      2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
      3. Pelaksanaan urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan pembagunan;
      4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan pembangunan; serta
      5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan pembangunan.

**5.3 Kepala Seksi Pelyanan Perizinan dan Nonperizinan Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan**

Kepala seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan kesejahteran rakyat dan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Pelaksanaan urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan; serta
5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan kesejahteraan rakyat dan lingkungan.

**6. Kepala Bidang Penanaman Modal**

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penanaman modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Kepala Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program kerja dan kegiatan penanaman modal;
2. Pengoordinasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Penyelenggaraan urusan penanaman modal;
4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang penanaman modal; serta
5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi bidang penanaman modal.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal, Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal. Secara hirarki dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi, adalah sebagai berikut:

* 1. **Kepala Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal**

Kepala seksi data dan informasi penananaman modal mempunyai tugas melaksanakan urusan data dan informasi penanaman modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Kepala seksi data dan informasi penananaman modal melaksanakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi data dan informasi penanaman modal;
2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Pelaksanaan urusan data dan informasi penanaman modal;
4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi data dan informasi penanaman modal; serta
5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi seksi data dan informasi penanaman modal.
   1. **Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Kepala seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal. Seksi pengendalian pelaksanaan dan penanaman modal melaksanakan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Pelaksanaan urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal; serta
5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
   1. **Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal**

Kepala seksi perencanaan, pengembangan iklim,promosi dan fasilitasi penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, dan fasilitasi penanaman modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi.

Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan fasilitasi penanaman modal melaksanan fungsi :

1. Perencanaan kegiatan seksi perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan fasilitasi penanaman modal;
2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Pelaksanaan urusan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
4. Pelaksanaan urusan promosi dan fasilitasi penanaman modal;
5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan fasilitasi penanaman modal; serta
6. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsiseksi perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan fasilitasi penanaman modal.

**7. Kepala Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan**

Kepala Bidang pengaduan, pengendalian kebijakan dan pelaporan layanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengaduan, pengendalian, kebijakan dan pelaporan layanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam rangka peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan. menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan program kerja dan kegiatan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
2. Pengoorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Penyelenggaraan urusan pengaduan, pengendalian, kebijakan dan pelaporan layanan;
4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang pengaduan, pengendalian, kebijakan dan pelporan layanan; serta
5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi seksi pengaduan, pengendalian kebijakan dan pelaporan layanan.

Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Pengaduan, pengendalian dan Informasi Layanan, Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan serta Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan. Secara hirarki dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi, adalah sebagai berikut:

* 1. **Kepala Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan**

Kepala seksi pengaduan, pengendalian dan informasi layanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengaduan, pengendalian dan informasi layanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangaka meningkatkan layanan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan seksi pengaduan, pengendalian dan informasi layanan;
2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Pelaksanaan urusan pengaduan, pengendalian dan informasi layanan;
4. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi pengaduan, pengendalian dan informasi layanan; serta
5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi seksi pengaduan, pengendalian kebijakan dan pelaporan layanan.
   1. **Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan**

Kepala seksi kebijakan dan penyuluhan layanan mempunyai tugas melaksanakan urusan kebijakan dan penyuluhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan layanan. Dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan seksi kebijakan dan penyuluhan layanan;
2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Pelaksanaan urusan kebijakan dan penyuluhan layanan;
4. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi kebijakan dan penyuluhan layanan; serta
5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi seksi kebijakan dan penyuluhan layanan.
   1. **Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan**

Kepala seksi pelaporan dan peningkatan layanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelaporan dan peningakatan layanan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan layanan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan seksi pelaporan dan peningkatan layanan;
2. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
3. Pelaksanaan urusan pelaporan dan peningkatan layanan;
4. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi pelaporan dan peningkatan pelayanan; serta
5. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi seksi pelaporan dan peningkatan pelayanan.
   1. **Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi pemerintah secara keseluruhan karena aparatur pemerintah merupakan subyek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Sebaik apapun suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis untuk dilaksanakan pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi komposisi Aparatur per 31 Desember 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sebanyak 61 Orang, yang terdiri dari 14 Orang pejabat struktural, 22 Orang pegawai non struktural, 25 orang Non PNS Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**

**Daftar Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Status Kepegawaian | Jumlah |
| 1.  2. | Pegawai Negeri Sipil  Non PNS | 36 Orang  25 Orang |
|  | **Jumlah** | **61 Orang** |

Dalam rangka mendukung pelayanan terutama dalam memverifikasi dan menganalisis di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal ditinjau pada tingkat pendidikan masih belum memadai sehingga dibutuhkan pelatihan dan peningkatan pemahaman yang dapat menunjang kecakapan dan kompetensi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Daftar pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**

Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDM | Pangkat/Gol Ruang | | | | Jenis Kelamin | | Pendidikan | | | | | | JUMLAH PEGAWAI |
| IV | III | II | I | L | P | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD |
| PNS | 5 | 22 | 9 | - | 16 | 20 | 6 | 14 | 3 | 9 | - | - | 36 |
| Non PNS | - | - | - | - | 10 | 15 | - | 9 | 1 | 15 | - | - | 25 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | | | | | **61** |

**2.2.1 Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. Adapun kondisi sarana

dan prasarana pendukung saat ini, untuk kelancaran kinerja DPMPTSP Kota Bontang berupa :

a. 1 ( satu ) unit bangunan gedung kantor dpmptsp

b. Kendaraan roda empat sebanyak 7 (tujuh) unit

c. Kendaraan roda dua sebanyak 15 (lima belas) unit serta inventaris dan fasilitasi/perlengkapan kantor lainnya.

**Tabel 2.3**

Adapun Rincian Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2016 s/d 2021

**1). Daftar Aset :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | | **Uraian** | | **Satuan** | | **Jumlah** | | **Merek** | **Kondisi** | |
| 1. | | Personal Komputer | | Unit | | 17 | | Lenovo | Baik | |
| 2. | | Personal Komputer | | Unit | | 3 | | Zyrex | Baik | |
| 3. | | Personal Komputer | | Unit | | 6 | | Dell | Baik | |
| 4. | | Personal Komputer | | Unit | | 2 | | LG | Baik | |
| 5. | | Personal Komputer | | Unit | | 1 | | HP | Baik | |
| 6. | | Personal Komputer | | Unit | | 2 | | Pro400SFF | Baik | |
| 7. | | Personal Komputer | | Unit | | 10 | | - | Baik | |
| 8. | | Komputer All In One | | Unit | | 8 | | Asus | Baik | |
| 9. | | Komputer All In One | | Unit | | 6 | | - | Baik | |
| 10. | | Laptop | | Unit | | 6 | | Asus | Baik | |
| 11. | | Laptop | | Unit | | 7 | | - | Baik | |
| 12. | | Laptop | | Unit | | 1 | | Appel | Baik | |
| 13. | | Note Book | | Unit | | 9 | | Asus | Baik | |
| 14. | | Note Book | | Unit | | 11 | | Toshiba | Rusak | |
| 15. | | Note Book | | Unit | | 4 | | Dell | Baik | |
| 16. | | Note Book | | Unit | | 1 | | Sony | Rusak | |
| **No.** | | **Uraian** | | **Satuan** | | **Jumlah** | | **Merek** | **Kondisi** | |
| 17. | | Note Book | | Unit | | 1 | | Acer Nitro.5 | Baik | |
| 18. | | Note Book | | Unit | | 3 | | - | Baik | |
| 19. | | Printer | | Unit | | 21 | | Epson | Baik | |
| 20. | | Printer | | Unit | | 10 | | Canon | Baik | |
| 21. | | Printer | | Unit | | 17 | | HP | Baik | |
| 22. | | Printer | | Unit | | 6 | | - | Baik | |
| 23. | | Printer Multifungsi | | Unit | | 5 | | Epson | Baik | |
| 24. | | Printer HP Laser Jet | | Unit | | 1 | | - | Baik | |
| 25. | | Printer Dot Matrix | | Unit | | 3 | | Epson LQ | Baik | |
| 26. | | Printer A3 | | Unit | | 1 | | Epson L3100 | Baik | |
| 27. | | CPU | | Unit | | 7 | | HP | Baik | |
| 28. | | CPU | | Unit | | 7 | | Lenovo | Baik | |
| 29. | | CPU | | Unit | | 5 | | Rakitan | Baik | |
| 30. | | CPU | | Unit | | 1 | | Compaq | Baik | |
| 31. | | CPU | | Unit | | 1 | | LG | Baik | |
| 32. | | Mouse | | Unit | | 4 | | Dell | Rusak | |
| 33. | | Mouse | | Unit | | 1 | | HP | Rusak | |
| 34. | | Mouse | | Unit | | 1 | | Vio | Rusak | |
| 35. | | Mouse | | Unit | | 2 | | - | Rusak | |
| 36. | | Peralatan Jaringan Lainnya | | Unit | |  | | - | Baik | |
| 37. | | Mesin Ketik Manual Portebel | | Unit | | 1 | | - | Baik | |
| 37. | | Mesin Ketik Manual Portebel | | Unit | | 1 | | - | Baik | |
| 38. | | Mesin Ketik Standar | | Unit | | - | | - | Rusak | |
| 39. | | Projektor LCD | | Unit | | 2 | | Acer | Baik | |
| 40. | | Projektor LCD | | Unit | | 1 | | Toshiba | Rusak | |
| 41. | | Layar LCD | | Unit | | 2 | | - | Baik | |
| 42. | | Scanner | | Unit | | 7 | | Plustek | Baik | |
| 43. | | Scanner | | Unit | | 4 | | Epson | Baik | |
| 44. | | Scanner | | Unit | | 2 | | Scen Snap | Baik | |
| **No.** | | **Uraian** | | **Satuan** | | **Jumlah** | | **Merek** | **Kondisi** | |
| 45. | | Scanner | | Unit | | 4 | | - | Baik | |
| 46. | | Unintemupublic Power Supply (UPS) | | Unit | | 7 | | Ica | Rusak | |
| 47. | | Unintemupublic Power Supply (UPS) | | Unit | | 2 | | APC | Rusak | |
| 48. | | Unintemupublic Power Supply (UPS) | | Unit | | 2 | | Liebert PSA | Rusak | |
| 49. | | Unintemupublic Power Supply (UPS) | | Unit | | 2 | | Sony | Rusak | |
| 50. | | Unintemupublic Power Supply (UPS) | | Unit | | 1 | | Bravo | Rusak | |
| 51. | | Camera Elektronik | | Unit | | 5 | | Canon | Baik | |
| 52. | | Camera Elektronik | | Unit | | 2 | | Sony | Rusak | |
| 53. | | Camera Elektronik | | Unit | | 1 | | Fuji | Rusak | |
| 54. | | Tripot Camera | | Unit | | 2 | | Qinghuangshidai | Baik | |
| 55. | | Tripot Camera | | Unit | | 2 | | - | Baik | |
| 56. | | Microphone tabe stand | | Unit | | 1 | | Bosch | Baik | |
| 57. | | Vidio Processor | | Unit | | 4 | | LG | Baik | |
| 58. | | Peralatan Antena | | Unit | | 27 | | Hyperlink | Rusak | |
| 59. | | Peralatan Antena | | Unit | | 2 | | Array Hyperlink | Baik | |
| 60. | | Televisi | | Unit | | 2 | | Changhong | Baik | |
| 61. | | Televisi | | Unit | | 1 | | Samsung | Baik | |
| 62. | | Televisi | | Unit | | 1 | | LG | Baik | |
| 63. | | Televisi | | Unit | | 1 | | Sharp | Baik | |
| 64. | | Televisi | | Unit | | 1 | | Sony | Rusak | |
| 65. | | Dispenser | | Unit | | 2 | | Modena | Baik | |
| 66. | | Dispenser | | Unit | | 2 | | Sanken | Baik | |
| 67. | | Dispenser | | Unit | | 2 | | Polytron | Rusak | |
| 68. | | Dispenser | | Unit | | 1 | | Miyako | Rusak | |
| 69. | | Lemari ES | | Unit | | 5 | | Sharp | Baik | |
| 70. | | Lemari ES | | Unit | | 1 | | Panasonic | Baik | |
| 71. | | Meja Kerja Pejabat Eselon II | | Unit | | 1 | | - | Baik | |
| 72. | | Meja Kerja Pejabat Eselon III | | Unit | | 1 | | Grend Furniture | Baik | |
| 73. | | Meja Kerja Pejabat Eselon III | | Unit | | 1 | | BOD | Baik | |
| **No.** | | **Uraian** | | **Satuan** | | **Jumlah** | | **Merek** | **Kondisi** | |
| 74. | | Meja Kerja Pejabat Eselon III | | Unit | | 1 | | - | Baik | |
| 75. | | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | | Unit | | 3 | | BOD | Baik | |
| 76. | | Meja Kerja Staf | | Unit | | 18 | | Grend Furniture | Baik | |
| 77. | | Meja Kerja Staf | | Unit | | 6 | | Metal Dexs | Baik | |
| 78. | | Meja Kerja Staf | | Unit | | 6 | | Activ | Baik | |
| 79. | | Meja Kerja Staf | | Unit | | 18 | | - | Baik | |
| 80. | | Meja Tambahan | | Unit | | 7 | | Grend Furniture | Baik | |
| 81. | | Meja Tambahan | | Unit | | 8 | | - | Baik | |
| 82. | | Meja Rapat Jati | | Unit | | 8 | | - | Baik | |
| 83. | | Meja Rapat | | Set | | 1 | | BOD | Baik | |
| 84. | | Meja Tamu Biasa | | Unit | | 1 | | Ligna Panjang | Baik | |
| 85. | | Meja Tamu Biasa | | Unit | | 1 | | Ligna Pendek | Baik | |
| 86. | | Meja Tamu Biasa | | Unit | | 1 | | Sero | Baik | |
| 87. | | Meja Komputer | | Unit | | 1 | | Crystal | Baik | |
| 88. | | Meja Komputer | | Unit | | 1 | | - | Baik | |
| 89. | | Meja Front Office | | Paket | | 1 | | - | Baik | |
| 90. | | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | | Unit | | 2 | | Husindo | Baik | |
| 91. | | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | | Unit | | 2 | | Fantoni | Baik | |
| 92. | | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | | Unit | | 1 | | Castillo | Baik | |
| 93. | | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | | Unit | | 3 | | Castillo | Baik | |
| 94. | | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III | | Unit | | 12 | | - | Baik | |
| 95. | | Kursi Rapat | | Unit | | 20 | | Omni Managerial | Baik | |
| 96. | | Kursi Rapat | | Unit | | 7 | | Husindo | Baik | |
| 97. | | Kursi Rapat | | Unit | | 20 | | Savello | Baik | |
| 98. | | Kursi Rapat | | Unit | | 20 | | Fronline | Baik | |
| 99. | | Kursi Staf | | Unit | | 22 | | Husindo | Baik | |
| 100. | | Kursi Staf | | Unit | | 3 | | Fronline | Baik | |
| 101. | | Kursi Staf | | Unit | | 5 | | Rakuda | Baik | |
| 102. | | Kursi Staf | | Unit | | 9 | | Creative | Baik | |
| **No.** | **Uraian** | | **Satuan** | | **Jumlah** | | **Merek** | | | **Kondisi** |
| 103. | Kursi Staf | | Unit | | 12 | | Omni Managerial | | | Baik |
| 104. | Kursi Staf | | - | | 7 | | - | | | Baik |
| 105. | Kursi Staf | | Unit | | 5 | | Citrus | | | Baik |
| 106. | Kursi Lipat | | Unit | | 5 | | - | | | Baik |
| 107. | Kursi Tamu | | Set | | 1 | | Ligna | | | Baik |
| 108. | Kursi Besi | | Unit | | 4 | | - | | | Baik |
| 109. | Kursi Roda | | Unit | | 1 | | Gea Wheel Chair | | | Baik |
| 110. | Kursi Pijat | | Unit | | 1 | | Xuf Word Leader | | | Baik |
| 111. | Sofa | | Set | | 2 | | Siro | | | Baik |
| 112. | Sofa | | Set | | 1 | | Jati | | | Baik |
| 113. | Sofa | | Set | | 1 | | Langley | | | Baik |
| 114. | Sofa Pelayanan | | Set | | 2 | | Langley | | | Baik |
| 115. | Kursi Staf | | Unit | | 5 | | Rakuda | | | Baik |
| 116. | Kursi Staf | | Unit | | 9 | | Creative | | | Baik |
| 117. | Kursi Staf | | Unit | | 12 | | Omni Managerial | | | Baik |
| 118. | Kursi Staf | | - | | 7 | | - | | | Baik |
| 119. | Kursi Staf | | Unit | | 5 | | Citrus | | | Baik |
| 120. | Kursi Lipat | | Unit | | 5 | | - | | | Baik |
| 121. | Kursi Tamu | | Set | | 1 | | Ligna | | | Baik |
| 122. | Partisi | | Set | | 1 | | - | | | Baik |
| 123. | Rak Besi | | Unit | | 4 | | - | | | Baik |
| 124. | Rak Server | | Unit | | 1 | | Fortuna | | | Baik |
| 125. | Filling Besi | | Unit | | 3 | | Datascrip | | | Baik |
| 126. | Filling Besi | | Unit | | 1 | | Lion | | | Baik |
| 127. | Filling Cabinet | | Unit | | 2 | | Orgenize | | | Baik |
| 128. | White Board | | Unit | | 2 | | Zansiba | | | Baik |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Satuan** | **Jumlah** | **Merek** | **Kondisi** |
| 129. | White Board | Unit | 3 | - | Baik |
| 130. | Papan Status Pejabat | Unit | 1 | Movitek | Baik |
| 131. | Papan Struktur Organisasi | Unit | 1 | Movitek | Baik |
| 132. | Berangkas | Unit | 1 | Krisbow | Baik |
| 133. | Berangkas | Unit | 1 | Sentri Safe | Baik |
| 134. | Peta | Unit | 1 | - | Baik |
| 135. | Tool Kit Set | Set | 1 | Tyokohama | Baik |
| 136. | GPS | Unit | 1 | Magillan | Baik |
| 137. | GPS | Unit | 1 | Garmin | Baik |
| 138. | Meteran Digital | Unit | 1 | Leica | Baik |
| 139. | Mesin Penghisap Debu | Unit | 2 | Sharp | Baik |
| 140. | Jam Mekanis | Unit | 1 | Sonata | Baik |
| 141. | Mixer | Unit | 1 | Yamaha | Baik |
| 142. | Stabilizer | Unit | 1 | Faiyutech | Baik |
| 143. | Generator | Unit | 2 | Honda | Baik |

Sumber Data : Bendahara Pengurus Barang DPMPTSP

**2). Sarana Fasilitas Lainnya :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Satuan** | **Jumlah** | **Merek** | **Kondisi** |
| 1. | Listrik PLN | Paket | 1 | - | Baik |
| 2. | PDAM | Paket | 1 | - | Baik |
| 3. | Air Conditioner (AC) | Unit | 15 | Sharp | Baik |
| 4. | Air Conditioner (AC) | Unit | 7 | Panasonic | Baik |
| 5. | Air Conditioner (AC) | Unit | 5 | LG | Baik |
| 6. | Standing AC | Unit | 2 | Changhong | Baik |
| 7. | PABK | - | - | - | - |
| 8. | CCTV | Unit | 17 | Hikvision | Baik |
| 9. | Monitor CCTV | - | - | - | Baik |
| 10. | Telpon / Fax | Unit | 4 | Faavorite | Baik |
| 11. | Telpon / Fax | Unit | 4 | LG | Baik |
| 12. | Telpon / Fax | Unit | 2 | Panasonic | Baik |
| 13. | Server | Unit | 2 | Shinksystem | Baik |
| 14. | Internet (Wifi) | Paket | 1 | - | Baik |
| 15. | Tekon Listrik | Unit | 1 | - | Baik |
| 16. | Runing Tex | Unit | 1 | - | Baik |
| 17. | Finger Print | Unit | 1 | - | Baik |

Sumber Data : Bendahara Pengurus Barang DPMPTSP

**3). Sarana Transportasi, terdiri dari :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Satuan** | **Jumlah** | **Merek** | **Kondisi** |
| 1. | Kendaraan Roda 4 | Unit | 1 | Toyota | Baik |
| 2. | Kendaraan Roda 4 | Unit | 1 | Toyota | Baik |
| 3. | Kendaraan Roda 4 | Unit | 1 | Toyota | Baik |
| 4. | Kendaraan Roda 4 | Unit | 1 | Toyota, Kijang Innova | Baik |
| 5. | Kendaraan Roda 4 | Unit | 1 | Toyota | Baik |
| 6. | Kendaraan Roda 4 | Unit | 1 | Toyota | Baik |
| 7. | Kendaraan Roda 4 | Unit | 1 | Toyota | Baik |
| 8. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Honda | Baik |
| 9. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Honda | Baik |
| 10. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Yamaha | Baik |
| 11. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Honda | Baik |
| 12. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Yamaha | Baik |
| 13. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Honda | Baik |
| 14. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Yamaha | Baik |
| 15. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Honda | Baik |
| 16. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Honda | Baik |
| 17. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Honda | Baik |
| 18. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Honda | Baik |
| 19. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Honda | Baik |
| 20. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Yamaha | Baik |
| 21. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Honda | Baik |
| 22. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Honda | Baik |
| 23. | Kendaraan Roda 4 | Unit | 1 | Hilux 2,5GDouble Cabin (4X4) M/T | Baik |
| 24. | Kendaraan Roda 4 | Unit | 1 | Toyota | Baik |
| 25. | Kendaraan Roda 2 | Unit | 1 | Toyota | Baik |

Sumber Data : Bendahara Pengurus Barang DPMPTSP

* 1. **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Penanaman Modal merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Begitu juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal khususnya pasal 30 Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan urusan Penanaman Modal apabila mendapatkan pelimpahan mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkup lintas Kabupaten/Kota dan atau pelimpahan dari pemerintah yang ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan, di bidang Penanaman Modal akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang sampai saat ini masih dalam pembahasan. Adapun Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada periode 2016 – 2020 berdasarkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan jumlah pengaduan dari masyarakat karena ketidakpuasan atas pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Tahun 2016 – 2021**

| **No.** | **Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah** | **Target**  **SPM** | **Target IKK** | **Target Indikator Lainnya** |  | **Target Capaian Tahun Ke-** | | | | | **Realisasi Capaian Tahun Ke-** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** | **(15)** | **(16)** |
| **I** | **Aspek Pelayanan Umum** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** | **Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Penanaman Modal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN |  | √ |  | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 23 | 10 | 129 |
| 2. | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA |  | √ |  | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 27 | 15 | 12 |
| 3. | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN Rp. X (000.000,-) |  | √ |  | 805.555 | 861.943 | 922.279 | 1.488.926 | 1.563.723 | 1.641.909 | 4.112.008.392.990,00 | 5.111.733.218.463,25 | 5.955.705.469.509,25 | 667.213.578.178,91 | 1.740.462.408.735,28 |
| 4. | Jumlah Nilai investasi Berskala Nasional PMA $ X (000) |  | √ |  | 297.017 | 317.808 | 340.054 | 188.093 | 206.902 | 227.592 | 235.349.819,43 | 531.468.705,14 | 188.092.404,44 | 280.629.747,84 | 167.314.870,85 |
| 5. | Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rupiah) |  | √ |  | -0,09 | 7 | 7 | 61,44 | 5,02 | 5 | -66,56% | 24,31% | 16,51% | -88,80% | 160,85% |
| 6. | Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMA (Dollar/$) |  | √ |  | -0,08 | 7 | 7 | 44,69 | 10 | 10 | 62,37% | 125,82% | -64,60% | 49,20 | -62,65% |
| 7. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |  | √ |  | 78 | 78 | 79 | 84 | 85 | 86 | 0 | 81.75 | 77.06 | 82.63 | 86,30 |

**Tabel 2.5**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Tahun 2016 - 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **ANGGARAN TAHUN KE-** | | | | | **REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-** | | | | | **RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** | ***(6)*** | ***(7)*** | ***(8)*** | ***(9)*** | ***(10)*** | ***(11)*** | ***(12)*** | ***(13)*** | ***(14)*** | ***(15)*** | ***(16)*** |
| A. BELANJA TIDAK LANGSUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belanja Pegawai | 4,159,862,025.00 | 5,212,258,330.00 | 7,814,285,226.00 | 7,187,830,343..00 | 6,843,996,037.00 | 4,007,173,375.00 | 4,634,228,571.00 | 7,034,688,988.00 | 6,791,771,346.00 | 6,189,489,852.00 | 96.33% | 88.91% | 90.02% | 94.49% | 90.44% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. BELANJA LANGSUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belanja Pegawai | 1,367,189,424.00 | 1,514,038,032.00 | 456,916,250.00 | 21,600,000.00 | 5,020,000.00 | 1,285,908,280.00 | 1,313,206,711.00 | 452,816,250.00 | 21,600,000.00 | 5,020,000.00 | 94.05% | 86.74% | 99.10% | 100% | 100% |
| Belanja Barang dan Jasa | 2,278,528,800.00 | 1,804,433,330.00 | 3,896,936,140.00 | 3,375,592,065.00 | 3,357,809,484.00 | 2,242,016,118.00 | 1,757,262,056.00 | 3,745,964,329.00 | 3,319,148,847.00 | 3,258,625,722.00 | 98.40% | 97.39% | 96.13% | 98.33% | 97.05% |
| Belanja Modal | 9,020,000.00 | 214,474,000.00 | 672,132,660.00 | 2,337.967,400.00 | 941,211,000.00 | 9,955,000.00 | 196,392,900.00 | 647,022,500.00 | 2,319,185,500.00 | 930,712,420.00 | 110.37% | 91.57% | 96.26% | 99.20% | 98.88% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **7,814,600,249.00** | **8,745,203,692.00** | **12,840,270,276.00** | **12,922,989,808.00** | **11,148,036,521.00** | **7,545,052,753.00** | **7,901,090,238.00** | **11,880,492,067.00** | **12,451,705,693.00** | **10,383,847,994.00** | **96.55%** | **90.34%** | **92,53%** | **96.35%** | **93,15%** |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Uraian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sumber Data | Perangkat  Daerah/Instansi | Keterangan |
|
| 247 | Jumlah perizinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | Jumlah | 2.403 | 2.399 | 1.658 | 1.430 | 1.313 | 1.436 | https://siperietnik.bontangkota.go.id | DPMPTSP | Rekapitulasi SK Terbit Perizinan |

**Tabel 2.6**

**INDIKATOR SIPD DATA KINERJA URUSAN**

**Tabel 2.7**

**Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA**

**Serta Peningkatan Jumlah Investor PMDN dan PMA**

**TAHUN 2016 - 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN/SASARAN** | **REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE -** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di Kota Bontang | Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN Rp. X (000.000,00) | 4.112.008.392.990,00 | 5.111.733.218.463,25 | 5.955.705.469.509,25 | 667.213.578.178,91 | 1.740.462.408.735,28 |
|  |  |  | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMA $ X (000,00) | 235.349.819,43 | 531.468.705,14 | 188.092.404,44 | 280.629.747,84 | 167.314.870,85 |
|  |  |  | Kenaikan/Penurunan Jumlah Nilai Investasi PMDN | -66,56% | 24,31% | 16,51% | -88,80% | 160,85% |
|  |  |  | Kenaikan/Penurunan Jumlah Nilai Investasi PMA | 62,37% | 125,82% | -64,60% | 49,20% | -62,65% |
|  |  |  | Peningkatan Jumlah Investor (PMDN/Tahun) | 9 | 11 | 23 | 10 | 129 |
|  |  |  | Peningkatan Jumlah Investor (PMA/Tahun) | 14 | 12 | 27 | 15 | 12 |

****

**Gambar 2.3 Grafik Nilai Realisasi Investasi PMDN Per Tahun**

**Gambar 2.4 Grafik Nilai Realisasi Investasi PMA Per Tahun**

** Gambar 2.5 Grafik Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA 2016 - 2020**

**Gambar 2.6 Grafik Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA 2016 - 2020**

**Tabel 2.8**

**Perkembangan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**

TAHUN 2016 - 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE - | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Mutu Pelayanan dan PAD dari Retribusi Perizinan | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | **0** | **81,75** | **77,06** | **82,63** | **86,30** |

** Gambar 2.7 Grafik Nilai Indek Kepuasan Masyarakat**

**Dari Tabel 2.7 dan 2.8** tersebut diatas, dapat terlihat bahwa peningkatan jumlah investor Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) terlihat pada tahun 2016 sebanyak 9 investor, tahun 2017 sebanyak 11 dan tahun 2018 sebanyak 23 Investor sampai dengan tahun 2018, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 10 investor. Untuk Investor Penanam Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hanya saja di tahun 2017 dan tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan.

Untuk Nilai Realiasi Investasi PMDN juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 atau **-66,56%** sampai dengan tahun 2018 atau **16,51%**, hanya saja di tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan, akbiat adanya penurunan jumlah investor PMDN. Sedangkan untuk Nilai Realisasi Investasi PMA mengalami penurunan dari tahun 2016 atau **62,37%** menjadi **-64,60%** di tahun 2018, serta pada tahun 2019 sebesar **49,20%** menurun menjadi sebesar **-62,65%** pada tahun 2020.

Untuk Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan dari tahun 2016 senilai 0 (Nihil) menjadi **86,30** pada tahun 2020, hal ini disebabkan oleh adanya :

1. Peningkatan pelayanan publik melalui inovasi Aplikasi *SIPERI-ETNIK* (Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik);
2. Kecepatan dalam pelayanan perizinan meningkat sejak adanya penerapan Aplikasi Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik;
3. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi melalui perjanjian kerjasama antara Bankaltimtara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait pembayaran Non Tunai;
4. Peningkatan sarana dan prasarana ruang front office; dan
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) front office yang semakin baik melalui pelatihan *excellent service*

**2.3.1 Inovasi yang dilakukan dalam pemberian pelayanan perizinan**

**Pada tahun 2019 DPMPTSP yaitu :**

1. Melaksanakan pelayanan perijinan keliling ( Peri-Link), 2 in 1 Servis.

2. Sistem perijinan elektronik ( Si Peri Etnik),

3. Bersama Kami Sehari Saja ( Bersahaja)

4. Pelayanan Antar Ijin Sampai Rumah ( Antarin Saimah)

**2.3.2 Adapun penghargaan yang diterima oleh DPMPTSP pada Tahun 2019 yaitu :**

1). Penganugerahan Indonesia Innovasi Award 2019

Best Walikota Indonesia Innvasion Awward “ Best Innovetion on Medium and Small Govermance 2019 “

2). Piagam pencanangan Zona Integritas

3). Piagam pernghargaan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indnesia berdasarkan Evaluasi Pelayanan Piblik 2019 yang merupakan penghargaan tingkat nasional atas keberhasilan pelayanan publik dengan predikat **SANGAT BAIK.**

4). Penganugerahan predikat kepatuhan satandar pelayanan publik tertimggi kategori kota 2019 dari Ombudsman Republik Indonesia.

5). Memperoleh Piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur dengan Inovasi “ **SIPERI-ETNIK (SISTEM PERIZINAN ELEKTRONIK)** – Juara III *Nomor : 002.7/B146/Litbang/XII/2019.*

6). Tropy dan Piagam Keberhasilan Pembangunan dari Gubernur Kalimantan Timur – Terbaik III (Tiga) pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Inovasi Si Peri Etnik.

7). Penyerahan Sertifikat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( E- SAKIP) DPMPTSP Tahun 2019 dengan **Predikat “ SANGAT BAIK” (BB)**

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

**2.4.1 Tantangan**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kota Bontang saat ini. Terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2021-2026.

Adapun Tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang 2021 – 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Penerapan *Sustainable Development Goals* oleh Pemerintah Indonesia perlu memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah;
2. Dinamika perubahan regulasi kebijaksanaan nasional yang cukup sering harus direspon oleh daerah secara cepat;
3. Tuntutan perwujudan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih 2021 – 2026 yang tercantum dalam RPJMD Kota Bontang 2021 – 2026;
4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat dan transparan;
5. Adanya persaingan Pelayanan Investasi dengan daerah lain;
6. *Goodgovernance* sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan; serta
7. Kecenderungan penurunan pendapatan daerah selama beberapa tahun terakhir yang berdampak pada terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan dan perlunya dilakukan perubahan perencanaan.

**2.4.2 Peluang**

Disamping tantangan yang sudah disebutkan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain :

1. Penataan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Perkembangan Teknologi yang semakin pesat terhadap pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
3. Minat berusaha masyarakat semakin meningkat;
4. Adanya dukungan Kepala Daerah dalam memberikan motivasi dan dorongan bagi seluruh Apartur Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi; serta
5. Beberapa program yang telah direncanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan sangat menunjang dan memberi peluang untuk terlaksananya seluruh tugas dan fungsi dengan baik.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**3.1 Identifikasi Permasalahan**

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan DPMPTSP dalam mendukung pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Bontang 5 (lima) tahun mendatang. Pemetaan permasalahan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif dari DPMPTSP. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis kedepan.

Sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan selama periode 2021 - 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, disusun rencana strategi yang berbasis isu-isu strategis yang diidentifikasi dari adanya kesenjangan antara kondisi nyata saat ini tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan pada tahun 2026, sehingga rencana strategis lebih realistis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dpmptsp, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam hal pelayanan penanaman modal dan perizinan.

Ada beberapa permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik maupun mancanegara guna meningkatkan investasi, dikarenakan masih dalam kondisi pandemi covid- 19;
2. Lahan peruntukan untuk investasi sangat terbatas, sehingga minat investor untuk membuka peluang investasi di Kota Bontang sangat minim;
3. Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi, termasuk profil Komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi yang rinci sehingga Calon Investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap bisnisnya;
4. Belum merata dan kuatnya daya saing sumber daya manusia termasuk terbatasnya tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi;
5. Kewenangan perizinan yang masih belum jelas pembagiannya;
6. Layanan Online Single Submission (OSS) belum maksimal termasuk masih terbatasnya pengetahuan tentang penerapan OSS bagi perusahaan maupun investor; dan
7. Pelaku usaha belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara rutin kepada bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kota Bontang.

**Tabel 3.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR PERMASALAHAN |
| I. | Penurunan Nilai Investasi | 1. Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal | 1.1 Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan Penanaman Modal |
|  |  |  | 1.2 Kurangnya dukungan dari perangkat daerah teknis |
|  |  |  | 1.3 Ketersediaan Kapasitas SDM masih kurang |
|  |  |  | 1.4 Adanya tumpang tindih kewenangan perizinan |
|  |  |  | 1.5 Adanya keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) |
|  |  | 2. Ketersediaan lahan untuk investasi kurang | 2.1 Kawasan industri sebagai Lahan untuk investasi yang siap untuk dikembangkan masih terbatas |
|  |  |  | 2.2 Adanya gesekan dan benturan kepentingan dengan warga /masyarakat setempat |
|  |  | 3. Adanya kondisi pandemi Covid 19 | 3.1 Kurangnya investor yang ingin berinvestasi di Kota Bontang karena adanya pandemi Covid 19 |
| 2. | Perlu dukungan dalam kegiatan MPP | 4. Mall Pelayanan Publik (Pelayanan cepat dan prima) | 4.1. Perlu adanya Payung Hukum yang memadai |
|  |  |  | 4.2. Lokasi dan pembangunan Kawasan MPP perlu diperjelas. |
|  |  |  | 4.3. Perlu Dukungan Anggaran agar mempercepat layanan MPP |
| No. | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR PERMASALAHAN |
| 3. | Perlu dukungan dalam SKM (survey kepuasan masyarakat) | 5. Adanya ketidak puasan dalam pelayanan | 5.1. Belum memadai sarana dan prasarana pendukung dalam SKK |
| 4. | Perlu dukungan dalam meminimalisir keluhan dalam pelayanan perijinan | 6. Adanya ketidakpuasan dalam pelayanan | 6.1. Meningkatkan SDM petugas layanan  6.2. Perlu adanya dukungan anggaran dalam penetapkan hasil survey |
| 5. | Adanya system perizinan online dari pusat (OSS RBA) | 7. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menurun | 7.1 Sistem perizinan online dari pusat belum terintegrasi dengan system yang ada disektor-sektor |
|  |  | 8. Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan akan menurun | 8.1 Proses perizinan akan menjadi lambat |
| 6 | Perlu dukungan dalam pelaksanaan promosi potensi daerah | 9. Jadwal pelaksanaan promosi yang telah diagendakan tidak dapat terlaksana | 9.1 Kurangnya dukungan APBD dari Pemkot Bontang |

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang yang akan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu-isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Menelaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan di Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi bahan masukan bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan terhadap faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Adapun penetapan Visi dan Misi pembangunan 5 (lima) Tahun kedepan (2021-2026), Yaitu **“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”**

Dari visi tersebut telah ditetapkan 3 Misi pembangunan, yaitu :

**Misi 1** : Kota Bontang yang *HARMONI* melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan

**Misi 2** : Kota Bontang yang *BERKELANJUTAN* layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup

**Misi 3** : Kota Bontang yang *BERDAYA SAING* dan *SEJAHTERA* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia

Adapun Misi Pemerintah Kota Bontang yang sangat erat kaitannya dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026 pada **Misi Ke-2**, yakni Kota Bontang yang *BERKELANJUTAN* layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

Tujuan dari Misi Ke-2 ini adalah :

1. *Meningkatnya pelayanan kinerja perangkat daerah*
2. *Mewujudkan iklim investasi yang kondusif*
3. *Terwujudnya pelayanan publik yang prima*

Dengan sasaran strategis yang akan dicapai adalah :

1. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan profesionalitas aparatur*
2. *Meningkatnya nilai investasi (PMDN/PMA)*
3. *Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan*

Serta penetapan Indikator Tujuan dan Sasaran, yaitu :

**A). Pertumbuhan Nilai Investasi**

1. *Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) Rp. X (000.000,00)*
2. *Jumlah nilai investasi bersakal nasional (PMA) $ X (000,00)*

**B). Peningkatan Jumlah Investor**

* 1. *Jumlah investor berskala nasional (PMDN)*
  2. *Jumlah investor berskala nasional (PMA)*

**C). Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Berdasar pada visi RPJPD Kota Bontang 2005 – 2025 yaitu **“Terwujudnya Kota Bontang Yang Lebih Hebat dan Beradab”**  pada saat ini telah memasuki tahapan pemantapan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kota Bontang. sebagai tahap pemantapan dengan periode pelaksanaan 2020 – 2024 dirujuk oleh walikota dan wakil walikota terpilih Kota Bontang untuk menentukan visi dan misinya. Visi Kota Bontang 2021 – 2026 adalah **“Terwujudnya Kota Bontang Yang Lebih Hebat dan Beradab”**

Dengan visi tersebut diharapkan dapat memacu semangat kerja perangkat daerah dan masyarakat untuk membangun Kota Bontang melalui peningkatan pertumbuhan nilai investasi dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan sehingga terwujud perekonomian daerah yang berdaya saing dan mendorong peningkatan potensi ekonomi lokal yang sejahtera.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masuk dalam Misi 2 yaitu Kota Bontang yang **BERKELANJUTAN,** layak huni, cerdas dan berwaswasan lingkungan melaui pemantapan ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung visi Walikota terpilih melalui optimalisasi kerjasama dengan para investor guna meningkatkan pembangunan khususnya industri hilir sehingga tercapai masyarakat Kota Bontang yang sejahtera. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dijabarkan pada Tabel 10 berikut ini :

**Tabel 3.2**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| **Visi : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Misi dan Program**  **KDH dan Wakil KDH terpilih** | **Permasalahan Pelayanan SKPD** | **Faktor** | | | |
| **Penghambat** | | **Pendorong** | |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | | ***(5)*** | |
| 1. | Misi 2  Kota Bontang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup | | | | | |
|  | Program-program :   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 3. Program Promosi Penanaman Modal 4. Program Pelayanan Penanaman Modal 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6. Program Pengelolaan Data dan   Sistem Informasi Penanaman Modal | 1. Belum optimalnya pelayanan, dikarenakan kurangnya dukungan dari Perangkat Daerah Teknis  2. Kurangnya Anggaran untuk peningkatan SDM  3. Sumber daya aparatur belum bersertifikat keahlian  di bidang Penanaman modal  4. Kemampuan SDM dalam berbahasa asing masih kurang  5. Kurang sinerginya perusahaan dalam memberikan informasi kepada Perangkat Daerah  6. Kurangnya pemahaman pelaku usaha/perusahaan dalam menyampaikan laporan LKPM | | 1. Perusahaan/Investor belum rutin untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | | 1. Meningkatkan intensitas rutin terhadap proses pengendalian berupa pelaksanaan pembinaan,  pemantauan, monitoring dan sosialisasi kepada perusahaan penanaman modal |

1. **Telaah Renstra K/L**

Hasil telaahan terhadap sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Investasi dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menjadi masukan dalam perumusan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Investasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dengan Renstra Kementerian Investasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau Kementerian Investasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 3.3**

**Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Jangka Menengah**  **Renstra DPMPTSP Provinsi** | **Permasalahan Pelayanan DPMPTSP** | **Sebagai Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| 1. | Terwujudnya pelayanan perizinan yang lebih mudah dan cepat | Terkendalanya penerbitan perizinan terkait bangunan dengan aturan yang ada | Belum ada aturan/kebijakan yang resmi terkait bangunan gedung | Perlu adanya kebijakan atau aturan terkait bangunan – bangunan yang telah lama terbangun sebelum terbit aturan yang baru |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Belum optimalnya pelayanan, dikarenakan kurangnya dukungan dari Perangkat Daerah teknis | Masih ada perizinan dan nonperizinan yang belum dilimpahkan kewenangan sepenuhnya kepada DPMPTSP | Perlu dilakukan koordinasi teknis dan adanya dukungan Anggaran APBD untuk mengakomodir kegiatan tersebut |
| 2. | Terwujudnya peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | LKPM yang disampaikan, tidak diberikan secara lengkap dan sesuai periode oleh pihak investor/pelaku usaha | Terbatasnya penggunaan aplikasi sistem online melalui SPIPISE bagi pelaku usaha/perusahaan | Memberikan form LKPM kepada perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku |
| Kurangnya tenaga teknis dilapangan | Waktu pelaksanaan monitoring dilapangan | Penambahan tenaga teknis untuk monitoring realisasi investasi, analis kebijakan penanaman modal serta analis pengembangan potensi daerah |
| Keterlambatan pelaporan LKPM online yang disampaikan oleh investor kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pusat | Tidak melaksanakan monitoring secara berkala | Memberikan surat konfirmasi berupa peringatan kepada pihak investor yang belum melaporkan LKPM-Nya |
| 3. | Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan | Adanya ketidakpuasan dalam pelayanan | Belum memadai sarana dan prasarana pendukung dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Adanya dukungan APBD untuk mengakomodir kegiatan tersebut |

1. **Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal adalah sebagai berikut :

1. Iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal masih menjadi faktor yang mempengaruhi berjalannya investasi di Kota Bontang, sehingga diperlukan komitmen dari Pemerintah Kota dalam memfasilitasi dan menyederhanakan perizinan usaha dan investasi; serta
2. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menuntut Pemerintah Kota memberikan informasi yang akurat dan cepat serta kemudahan dalam melayani masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi terkini, untuk itu diupayakan pengembangan untuk meningkatkan teknologi informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga dapat memberikan kemudahan bagi calon investor dan para pemohon izin untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

Dengan dirumuskannya isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi sehingga dapat mendorong daya saing investasi serta realisasi investasi di Kota Bontang.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Bontang Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam RPJMD Teknokratik DPMPTSP Kota Bontang Periode 2021-2026;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP selama lima tahun;
3. Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Penanaman Modal. Dengan demikian dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat :
4. Berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas;
5. Menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi; dan
6. Mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Bontang Tahun 2021-2026 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan pelayanan kinerja perangkat daerah

2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif

3. Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Sedangkan Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan profesionalitas aparatur

2. Meningkatnya nilai investasi (PMDN/PMA)

3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang**

**Tahun 2021 - 2026 (REVIU)**

Misi 2 : Kota Bontang *BERKELANJUTAN* yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup

| **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN** | **TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** | ***(6)*** | ***(7)*** | ***(8)*** | ***(9)*** |
| 1). Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur | 1). Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP  2). Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP | BB  B | BB  B | BB  BB | BB  BB | BB  BB | BB  A |
| 2). Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif  2). Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima | Meningkatnya Nilai Investasi (PMDN/PMA)  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan | 1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Rp.)  2.a Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) ( $.)  2.b Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) (Rp.)  4. Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) (Rp.)  5. Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp.) | 963.381.045.168,-  325.558.242,45  4.753.150.339.717,-  5.716.531384.885,-  1.394.557.147.530,- | 760.000.000.000,-  136.986.301,37  2.000.000.000.000,-  2.760.000.000.000,-  1.422.448.290.481,- | 775.200.000.000,-  139.726.027,40  2.040.000.000.000,-  2.815.200.000.000,-  1.450.897.256.291,- | 794.580.000.000,-  143.219.178,08  2.091.000.000.000,-  2.885.580.000.000,-  1.487.169.687.698,- | 818.417.400.000,-  147.515.753,42  2.153.730.000.000,-  2.972.147.400.000,-  1.531.784.778.329,- | 847.062.009.000,-  152.678.804,79  2.229.110.550.000,-  3.076.172.559.000,-  1.585.397.245.570,- |
| Jumlah Investor berskala nasional  (PMDN/(PMA) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| IKM | 86.30 | 81.12 | 78.20 | 79.50 | 83.00 | 86.30 |

**Tabel 4.2**

**Rumusan terkait informasi perhitungan Capaian Sasaran Indikator Kinerja**

12. Bidang Urusan : Penanaman Modal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
| 1. | Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah  Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Poin  Poin | 1). Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Bontang  2). Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Bontang |
| 2.a | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) Rp. X (000.000,00) | Rp. | Rumus : Jumlah nilai investasi pada tahun (n) x 100%  Jumlah nilai investasi pada tahun (n) |
| 2.b | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) $ X (000,00) | $ | Rumus : Jumlah nilai investasi pada tahun (n) x 100%  Jumlah nilai investasi pada tahun (n) |
| 3. | Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) | Rp. | Rumus : Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) Per tahun |
| 4. | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar rupiah) | Rp. | Rumus : Realisasi PMDN Tahun evaluasi – Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi x 100%  Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi |
| 4. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai IKM | Total nilai persepsi per unsur  ---------------------------------- x nilai penimbang  Total unsur yang terisi  **Penjelasannya :**  NRR per unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi  Nilai tertimbang = NRR per unsur x 0,111 per unsur  IKM = Jumlah NRR Tertimbang x 25  **(Keterangan** :   * NRR = Nilai Rata-Rata (diambil dari jumlah nilai unsur 1 s/d 9) * U1 s/d 9 = Unsur-Unsur Pelayanan (ada 9 Unsur Penilaian Pelayanan) |
| 4. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Jumlah | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) |

**PENCAPAIAN SASARAN YANG BERORIENTASI OUTCOME**

|  |
| --- |
| **Sasaran 1** |
| Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Tahun 2018** | | **%** | **Tahun 2019** | | **%** | **Tahun 2020** | | **%** |
| **Target** | **Realisasi** | **Target** | **Realisasi** | **Target** | **Realisasi** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | *8* | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** |
| 1 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) Rp. x (000.000,-) | Rp | 922.279 | 5.955.705 | **645.76** | 1.488.926 | 3.116.649 | **209.32** | 1.563.723 | 1.740.462 | **111,30** |
| 2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) $.x (000,-) | $ | 340.054 | 188.092 | **55.31** | 188.093 | 1.074.499 | **571.26** | 206.902 | 167.314 | **80,86** |

Pencapaian Sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3**

**Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP tahun 2018 - 2020**

Sasaran Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi dapat dilihat dari 2 indikator, yaitu :

1). Capaian Indikator Kinerja “Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN) Rp. x (000.000,-) adalah sebesar Rp. 1.740.462.408.735,28 dari target sebesar Rp. 1.563.723.000,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar **111,30%** *(Seratus sebelas koma tiga puluh persen).*

2). Capaian Indikator Kinerja “Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA) $. x (000,-) adalah sebesar $ 167.314.870,85 dari target sebesar $ 206.902.000 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar **80,86%** *(Delapan puluh koma delapan puluh enam persen).*

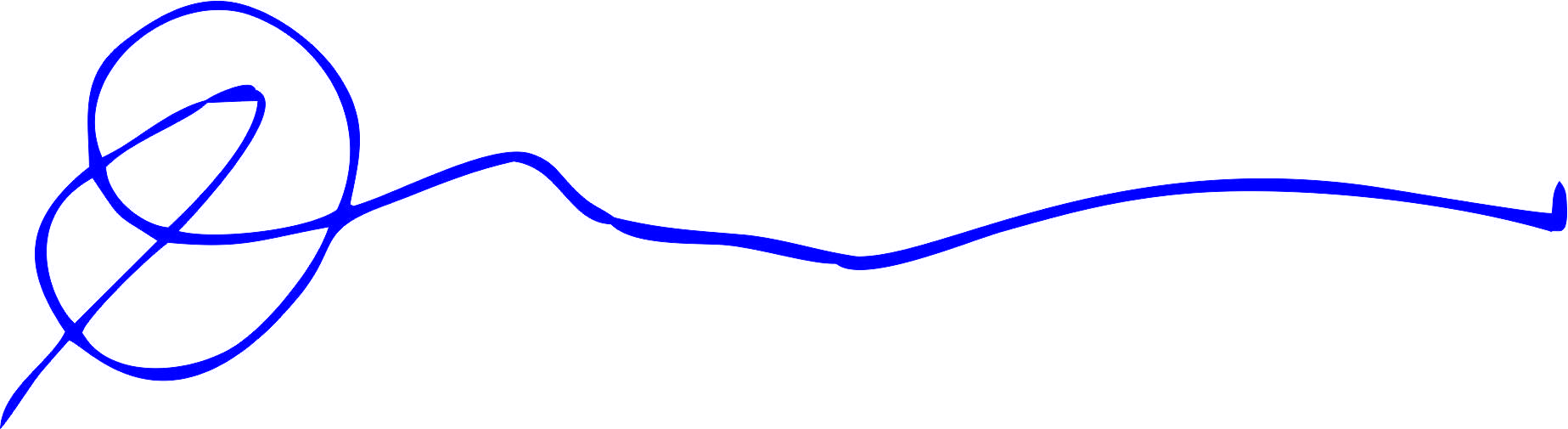
**Tabel 4.4**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator**  **Kinerja** | **Satuan** | **Realisasi** | | | | **%Peningkatan /PenurunanTahun 2020** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8 (7-6/6\*100%)* |
| 1. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) Rp. x (000.000,-) | Rp | 5.111.733 | 5.955.705 | 3.116.649 | 1.740.462 | **-44.15** |
| 2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) $.x (000,-) | $ | 531.468 | 188.092 | 1.074.499 | 167.314 | **-84.42** |

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), terdapat penurunan sebesar (**44.15%)** dengan Jumlah nilai realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 1.740.462.408.735,28 dibanding dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 3.116.649.506.638,00.

Sedangkan Jumlah realisasi investasi PMA pada tahun 2020 mengalami penurunan juga sebesar (**84.42%)** dengan nilai realisasi sebesar $ 167.314.870,85 dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar $ 1.074.499,44.

**Tabel 4.5**

**Perbandingan Realisasi 2020 dengan Target Akhir Renstra**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Target Akhir RENSTRA**  **(Tahun 2021)** | **Realisasi** | **%** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) Rp. x (000.000,-) | Rp | 1.641.909.000.000,00 | 1.740.462.000.000,00 | **106** |
| 2 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) $.x (000,-) | $ | 227.592.000,00 | 167.314.870,85 | **73,51** |

**Hambatan, Permasalahan dan Solusi**

Dari 2 indikator kinerja diatas, diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2020 belum mencapai target yang telah diperjanjikan, hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa perusahaan yang pelaksanaan proyeknya masih dalam masa konstruksi;
2. LKPM yang disampaikan, tidak diberikan secara lengkap dan sesuai periode olah pihak Investor;
3. Terjadinya pindah alamat kantor investor atau perubahan pengelola LKPM, alamat email dan nomor telepon tanpa pemberitahuan sebelumnya; dan
4. Keterlambatan pelaporan LKPM Online yang disampaikan oleh investor kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal / BKPM) Pusat.

Adapun solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan intensitas rutin terhadap proses pengendalian berupa pelaksanaan pembinaan, pemantauan, monitoring dan sosialisasi kepada perusahaan penanaman modal. Dibandingkan dengan realisasi jumlah nilai investasi PMDN pada Tahun 2019 sebesar Rp. 3.116.649.506.638,00, pada Tahun 2020 terdapat penurunan sebesar 44.15 % dengan Jumlah nilai realisasi sebesar Rp. 1.740.462.408.735,28, hal ini dikarenakan

ada beberapa faktor, yaitu :

1. Terdapat beberapa perusahaan yang pelaksanaan proyeknya masih dalam masa konstruksi;
2. Pada Tahun 2019, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan investasi berupa lokasi/lahan;
3. LKPM yang disampaikan, tidak diberikan secara lengkap dan sesuai priode oleh investor;
4. Terjadinya pindah alamat kantor investor atau perubahan
5. pengelola LKPM, alamat email dan nomor telepon tanpa pemberitahuan; dan
6. Keterlambatan pelaporan LKPM Online yang disampaikan oleh investor

kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Solusi yang telah dilakukan adalah intensitas kegiatan pengendalian berupa pelaksanaan pembinaan, pemantauan, monitoring dan sosialisasi kepada perusahaan penanaman modal.

**Tabel 4.6**

**Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis | %  Capaian Kinerja  (>100%) | | %  Penyerapan Anggaran | Tingkat  Efisiensi |
| *1* | *2* | *4* | | *5* | *6 (4-5)* |
| 1 | Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi |  | | 99,63 | **(18,65)** |
| Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) Rp. X (000.000,-) | 111,30 | **96,08** |
| Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) Rp. X (000,-) | 80,86 |

Capaian kinerja sebesar 111,30 % diperoleh dari realisasi jumlah nilai investasi Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.740.462.408.735,28 dibagi dengan nilai target sebesar Rp. 1.563.723.000,00 dikali 100%, sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar 99,63%. berasal dari 1 program kegiatan penunjang yaitu Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi sebesar Rp. 518.908.571,00,-

1. **Analisis program kegiatan yang mendukung sasaran 1**

Terdapat 1 Program dan 3 kegiatan penunjang yang mendukung sasaran 1 yaitu Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dengan anggaran sebesar Rp. 520.482.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 518.908.571,00 atau 99,63% yang terdiri dari Kegiatan pengembangan promosi potensi daerah dengan anggaran sebesar Rp. 520.002.000,00, Kegiatan Sosialisasi kebijakan penanaman modal dengan anggaran sebesar Rp. 840.000,00

|  |
| --- |
| **Sasaran 2** |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan |

1. **Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :**

**Tabel 4.7**

**Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP tahun 2018 - 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | % | Tahun 2019 | | % | Tahun 2020 | | % |
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | Nilai IKM | Nilai | 79 | 77,06 | **97,54** | 84 | 82,63 | **98,37** | 85 | 86,30 | **101,53** |

*\*Sumber : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat oleh Pemerintah Kota Bontang Melalui Bagian Organisasi (RealisasiTahun 2018 - 2020)*

Ukuran Keberhasilan penyelenggaran pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan Penerimaan pelayanaan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemerintahan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good govermance).* Untuk mendukung kebijakan pemerintahan tersebut perlu disusun Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintahan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kulaitas pelayan perizinan, disusun Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, disamping itu pula data IKM ini akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualias pelayanan. Capaian indikator kinerja Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atau IKM mencapai sebesar 86,30%, sehingga mencapai target yang telah ditetapkan dan menggambarkan kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dari Pemerintah Kota Bontang.

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator IKM ini adalah :

1. Peningkatan pelayanan publik melalui inovasi SIPERI-ETNIK (Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik);
2. Kecepatan dalam pelayanan perizinan meningkat sejak Penerapan Aplikasi OSS (Online Single Submission) atau sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik;
3. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui perjanjian kerja sama antara Bank Kaltimtara dengan DPMPTSP terkait pembayaran non tunai;
4. Peningkatan sarana dan prasarana ruang *front office*; dan
5. Kualitas SDM *front office* yang semakin baik melalui pelatihan *excelent service.*

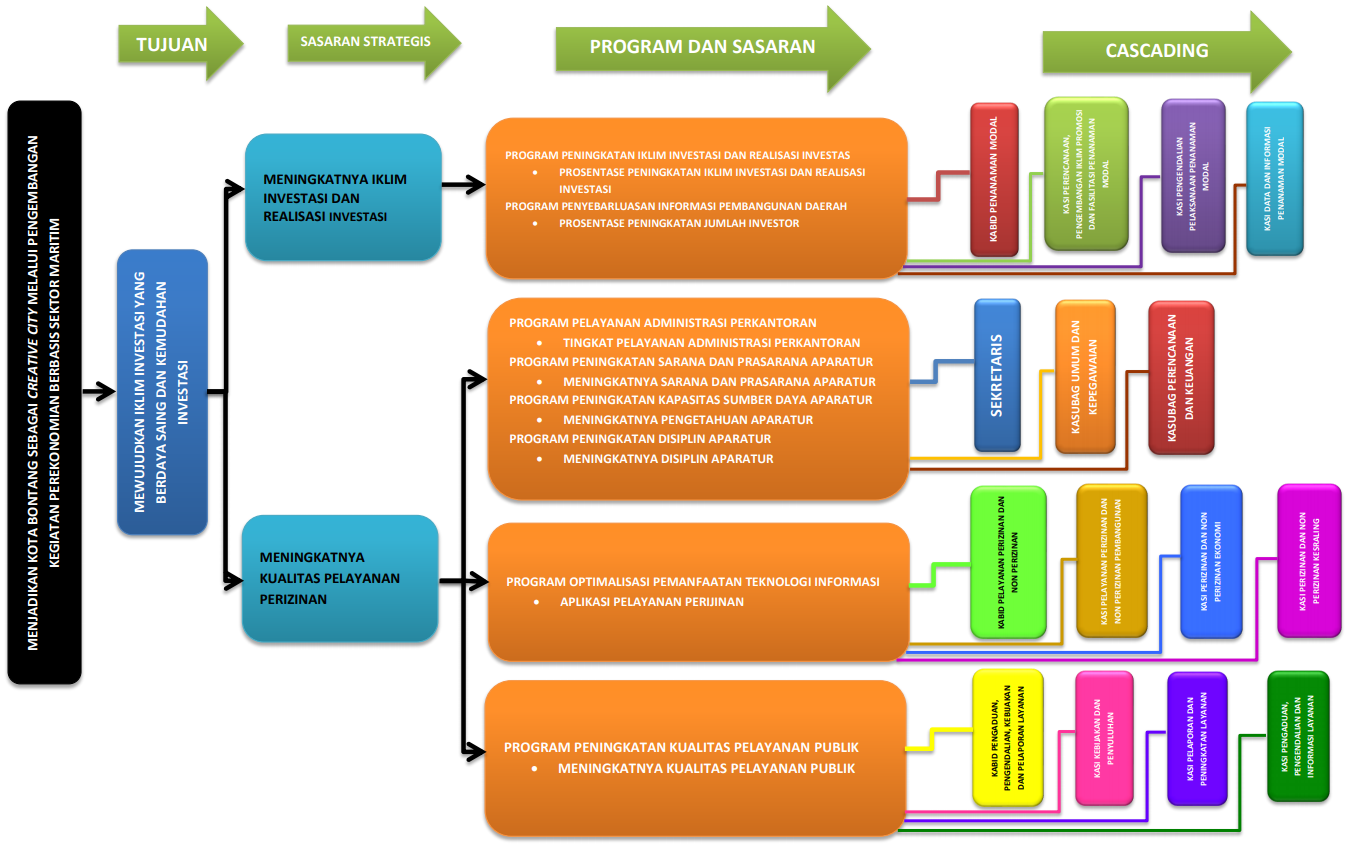
**Tabel 4.8**

**Perbandingan Realisasi Nilai IKM Tahun 2020 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | % Peningkatan /Penurunan  Tahun 2020 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 (7-6/6\*100%) |
| 1. | Nilai IKM | Nilai | 81.75 | 77.06 | 82.63 | 86.30 | 4.45 |

Realisasi IKM tahun 2020 dengan nilai 86.30 naik senilai 4.45% dari realisasi tahun 2019 dengan nilai 82.63. Pencapaian ini berasal dari laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang pada periode penilaian yaitu 1 Januari s/d 31 Desember 2020 berdasarkan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan dengan jumlah peserta survey sebanyak 1616 responden, dengan nilai IKM 86.30 dan meraih kategori **B–Baik** untuk mutu pelayanan.

**4.1 Target Kinerja Organisasi secara vertical dan horizontal (CASCADING)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2020**

****

**Gambar 4.1 CASCADING (Bentuk POHON KINERJA)**

**4.4 Penjabaran Peta Strategis**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP menjadi 3 (tiga) tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang yang mengacu pada RPJMD untuk jangka waktu tiga tahunan.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Adapun penjabaran dari Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Serta Penjabaran dari Peta Strategi DPMPTSP Kota Bontang Periode 2021 -2026 adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.2**

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026

**Kota Bontang yang *HARMONI* melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintanh, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan**

**Kota Bontang *BERKELANJUTAN* layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup**

**Kota Bontang yang *BERDAYA SAING* dan SEJAHTERA Melalui Kualitas Sumber Daya Manusia**

INSERT TEXT

HERE

Misi 1

Misi3

Misi2



**Gambar 4.3**

**Misi2 :Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA Melalui Kualitas Sumber Daya Manusia**

Penjabaran Misi 2 : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2026

**Tujuan1 :Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif**

**Tujuan2 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan**

**Sasaran1 :Meningkatnya Nilai Investasi (PMDN/PMA)**

**Strategi 1 :Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif**

**Kebijakan1 :**

**1 . Peningkatan Promosi Investasi Daerah**

**2. Penyempurnaan Regulasi**

**3. Peningkatan Pemanfaatan System Aplikasi Pelayanan Perizinan**

**Strategi 2 :Pengembangan Inovasi Layanan Publik**

**Sasaran2 :Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima**

**Kebijakan2 :**

**1 .Peningkatan SDM Pelayanan**

**2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

**3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**

**Gambar 4.4**

PETA STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu unsur penting dalam perencanaan pembangunan *daerah (strategy focused management).*

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang memiliki Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Pemantapan Iklim Investasi yang kondusif;
2. Pengembangan Inovasi layanan publik.

Sedangkan Arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Promosi Investasi Daerah;
2. Penyempurnaan Regulasi;
3. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal
4. Peningkatan SDM Pelayanan;
5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

**Tabel 5.1**

**Visi dan Misi DPMPTSP Kota Bontang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VISI : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab | | | | |
| MISI 2 RPJMD : Kota Bontang yang *BERKELANJUTAN*  layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup | | | | |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| 1. | Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif | Meningkatnya Nilai Investasi (PMDN/PMA) | 1). Pemantapan iklim investasi yang kondusif | 1. Peningkatan promosi investasi daerah |
| 2). Penyempurnaan regulasi |
| 3). Peningkatan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal; |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima | 2). Pengembangan inovasi layanan publik | 1). Peningkatan SDM Pelayanan |
| 2). Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik |
| 3). Peningkatan Kapasitas Kelambagaan. |

****

**Visi dan Misi DPMPTSP Kota Bontang**

STRATEGI 1

SASARAN 1

TUJUAN 1

TUJUAN 2

STRATEGI 2

SASARAN 2

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan perangkat daerah. Sedangkan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pembantu dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output maupun outcome sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang merupakan program prioritas dalam RPJMD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sebagaimana dijelaskan dalam program kegiatan dan sub kegiatan berikut ini :

* + 1. **Program**

Bertolak dari Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan, disusunlah program-program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sebagai berikut:

1. Program :

**A. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

* Program ini memiliki 7 (tujuh) Kegiatan dengan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan, sehingga dapat terlaksana pada tahun 2021 dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar **Rp. 10.774.542.301,00** *(Sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah). Adapun kondisi kinerja pada akhir tahun 2026* pada program ini adalah Prosentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang diperkirakan dapat terlaksana dengan total Pagu Anggaran sebesar**Rp. 62.405.173.504,00** *(Enam puluh dua milyar empat ratus lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah).*

2. Program :

**B. Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

* Pada program ini memiliki 2 (dua) Kegiatan dengan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 3 (tiga) Sub Kegiatan, sehingga dapat terlaksana pada tahun 2021 dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar **Rp. 331.482.623,00** *(Tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).* *Adapun kondisi kinerja pada akhir tahun 2026* pada program ini adalah Peningkatan Nilai Realisasi Investasi yang diperkirakan dapat terlaksana dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp. 2.125.752.073,00** *(Dua milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah).*

3. Program :

**C. Promosi Penanaman Modal**

* Program ini memiliki 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, sehingga dapat terlaksana pada tahun 2021 dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar **Rp. 410.454.287,00** *(Empat ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).* *Adapun kondisi kinerja pada akhir tahun 2026* pada program ini adalah Peningkatan jumlah investor yang diperkirakan dapat terlaksana dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp. 2.859.118.437,00** *(Dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).*

4. Program :

**D. Pelayanan Penanaman Modal**

* Program ini memiliki 1 (satu) Kegiatan dengan 5 (lima) Sub Kegiatan, sehingga dapat terlaksana pada tahun 2021 dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar **136.915.159,00** (*Seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)*. *Adapun kondisi kinerja pada akhir tahun 2026* pada program ini adalah Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperkirakan dapat terlaksana dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar **Rp. 2.137.932.360,00** *(Dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah).*

5. Program :

**E. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

* Program ini memiliki 1 (satu) Kegiatan dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan, sehingga dapat terlaksana pada tahun 2021 dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar **Rp. 516.037.347,00** (*Lima ratus enam belas juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)*. *Adapun kondisi kinerja pada akhir tahun 2026* pada program ini adalah Prosentase ketaatan perusahaan terhadap aturan penanaman modal yang diperkirakan dapat terlaksana dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar **Rp. 1.542.883.747,00** *(Satu milyar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).*

6. Program :

**F. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

* Program ini memiliki 1 (satu) Kegiatan dengan 1 (Satu) Sub Kegiatan, sehingga dapat terlaksana pada tahun 2021 dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar **Rp. 262.327.749,00** *(Dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).* *Adapun kondisi kinerja pada akhir tahun 2026* pada program ini adalah Prosentase ketersediaan data perizinan, yang diperkirakan dapat terlaksana dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar **Rp. 1.692.415.849,00** *(Satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).*

**6.2 Kegiatan**

Untuk mewujudkan program diatas, perlu disusun kegiatan-kegiatan beserta sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahunan, yang merupakan penjabaran dari Strategi dan Kebijakan untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran perangkat daerah.

Kegiatan-kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang yang akan dilakukan sebagai penjabaran program-program adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan antara lain:**
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub – Sub Kegiatan :
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD; serta
6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD
   1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub - Sub Kegiatan :
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub – Sub Kegiatan :
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub – Sub Kegiatan :
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; serta
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub – Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub – Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub – Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:**
   1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas Sub – Sub Kegiatan :
4. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

**b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, terdiri atas Sub – Sub Kegiatan :**

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM) Kabupaten/Kota; dan
2. Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.
3. **Program Promosi Penanaman Modal yang diwujudkan dalam Kegiatan – Kegiatan :**
   1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas Sub Kegiatan :
   2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal; dan
   3. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Pelayanan Penanaman Modal diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan antara lain:**
   1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas Sub-Sub Kegiatan antara lain :
5. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
7. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan;
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah;
9. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik; serta
10. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Layanan Perizinan.
11. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:**
    1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas Sub – Sub Kegiatan antara lain :
12. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
13. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
15. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:**
    1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas Sub Kegiatan :
16. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode 2021 – 2026, dijelaskan dalam Tabel 6.1. berikut ini :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 6.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TAHUN 2021 – 2026 (REVIU)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TUJUAN** | | **SASARAN** | | **KODE** | | **PROGRAM DAN KEGIATAN** | | **INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN** | | **TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA PD** | | | | | **Lokasi** | | | | |
| **TAHUN 2021** | | | | | **TAHUN 2022** | | | | **TAHUN 2023** | | | | **TAHUN 2024** | | | | **TAHUN 2025** | | | | **TAHUN 2026** | | | |
| **Target** | | **Anggaran Rp.** | | | **Target** | | **Anggaran Rp.** | | **Target** | | **Anggaran Rp.** | | **Target** | | **Anggaran Rp.** | | **Target** | | **Anggaran Rp.** | | **Target** | | **Anggaran Rp.** | | **Target** | | **Anggaran Rp.** | | |
| *1* | | *2* | | *3* | | *4* | | *5* | | *6* | | *7* | | | *8* | | *9* | | *10* | | *11* | | *12* | | *13* | | *14* | | *15* | | *16* | | *17* | | *18* | | *19* | | | *20* | | | | |
| **1). Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif** | | **1). Meningkatnya Nilai Investasi (PMDN/PMA)** | |  | |  | | **Pertumbuhan Nilai Investasi** | | **-14,90** | | **1.641.909.000,00** | | | **-1,20** | | **1.724.004.450,00** | | **1,22** | | **1.810.204.673,00** | | **2,41** | | **1.900.714.907,00** | | **2,94** | | **1.995.750.652,00** | | **3,43** | | **2.095.538.185,00** | | **3,43** | | **11.168.121.867,00** | | |  | | | | |
|  | |  | |  | |  | | **Peningkatan Jumlah Investor (PMDN)** | | **90** | |  | | | **95** | |  | | **100** | |  | | **105** | |  | | **110** | |  | | **115** | |  | | **115** | |  | | |  | | | | |
|  | |  | |  | |  | | **Peningkatan Jumlah Investor (PMA)** | | **1** | |  | | | **2** | |  | | **2** | |  | | **2** | |  | | **2** | |  | | **2** | |  | | **2** | |  | | |  | | | | |
| **2). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan** | | **2). Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima** | |  | |  | | **Nilai IKM** | | **86.30** | |  | | | **81.12** | |  | | **78.20** | |  | | **79.50** | |  | | **83.00** | |  | | **86.30** | |  | | **86.30** | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.01** | | **Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **100%** | | **10.774.542,301,00** | | | **100%** | | **10.020.461.949,00** | | **100%** | | **10.120.666.568,00** | | **100%** | | **10.221.873.234,00** | | **100%** | | **10.324.091.967,00** | | **100%** | | **10.943.537.485,00** | | **100%** | | **62.405.173.504,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | **2.18.01.2** | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**  **Perangkat Daerah** | | **Jumlah Dokumen yang dibuat** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **8 dok, 4 lap** | | **4.000.000,00** | | **8 dok, 4 lap** | | **4.000.000,00** | | **8 dok, 4 lap** | | **4.000.000,00** | | **8 dok, 4 lap** | | **13.000.000,00** | | **32 dok, 16 lap** | | **25.000.000,00** | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | - | | - | | | - | | - | | 2 dok | | 1.000.000,00 | | 2 dok | | 1.000.000,00 | | 2 dok | | 1.000.000,00 | | 2 dok | | 5.500.000,00 | | 8 dok | | 8.500.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.01.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | - | | - | | | - | | - | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 4 dok, 4 lap | | 2.000.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.01.02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan  RKA-SKPD | | - | | - | | | - | | - | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 4 dok, 4 lap | | 2.000.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.01.03 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | - | | - | | | - | | - | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 4 dok, 4 lap | | 2.000.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.01.04 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA Perubahan - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | - | | - | | | - | | - | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 1 dok, 1 lap | | 500.000,00 | | 4 dok, 4 lap | | 2.000.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.01.06 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | | - | | | - | | - | | 2 dok | | 1.000.000,00 | | 2 dok | | 1.000.000,00 | | 2 dok | | 1.000.000,00 | | 2 dok | | 5.500.000,00 | | 8 dok | | 8.500.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.01.2.01.07** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Jumlah laporan administrasi keuangan** | |  | | **7.840.578.349,00** | | |  | | **7.840.678.349,00** | |  | | **7.840.778.349,00** | |  | | **7.840.878.349,00** | |  | | **7.840.978.349,00** | |  | | **7.841.078.349,00** | |  | | **47.044.970.094,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.02.01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 35 orang | | 7.840.578.349,00 | | | 36 orang | | 7.840.678.349,00 | | 36 orang | | 7.840.778.349,00 | | 36 orang | | 7.840.878.349,00 | | 36 orang | | 7.840.978.349,00 | | 36 orang | | 7.841.078.349,00 | | 215 orang | | 47.044.970.094,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.01.2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah** | | **68 dok** | | **132.357.414,00** | | | **6 dok** | | **28.840.000,00** | | **68 dok** | | **134.062.614,00** | | **6 dok** | | **30.596.356,00** | | **68 dok** | | **135.857.414,00** | | **7 dok** | | **75.000.000,00** | | **223 dok** | | **536.713.798,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.05.02 | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | 1 paket | | 104.357.414.00 | | | - | | - | | 1 paket | | 104.357.414,00 | |  | | - | | 1 paket | | 104.357.414,00 | |  | | - | | 3 paket | | 313.072.242,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.05.09 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 35 orang | | 28.000.000,00 | | | 36 oran | | 28.840.000,00 | | 36 orang | | 29.705.200,00 | | 36 orang | | 30.596.356,00 | | 36 orang | | 31.500.000,00 | | 36 orang g | | 75.000.000,00 | | 215 orang | | 223.641.556,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.01.2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Jumlah dokumen administrasi umum** | | **16 jenis, 14 item** | | **481.618.388,00** | | | **17 jenis, 10 item** | | **265.000.000,00** | | **15 jenis, 10 item** | | **261.000.000,00** | | **15 jenis, 10 item** | | **261.000.000,00** | | **15 jenis, 10 item** | | **261.000.000,00** | | **16 jenis, 10 item** | | **595.000.000,00** | | **93 jenis, 64 item** | | **2.124.618.388,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.06.02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 8 jenis | | 25.152.217,00 | | | 10 jenis | | 75.000.000,00 | | 9 jenis | | 61.000.000,00 | | 9 jenis | | 61.000.000,00 | | 9 jenis | | 61.000.000,00 | | 9 jenis | | 75.000.000,00 | | 54 jenis | | 358.152.217,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.06.04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 14 item | | 139.152.652,00 | | | 10 item | | 40.000.000,00 | | 10 item | | 40.000.000,00 | | 10 item | | 40.000.000,00 | | 10 item | | 40.000.000,00 | | 10 item | | 90.000.000,00 | | 64 item | | 389.152.652,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.06.05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | 8 jenis | | 64.247.519,00 | | | 7 jenis | | 50.000.000,00 | | 6 jenis | | 50.000.000,00 | | 6 jenis | | 50.000.000,00 | | 6 jenis | | 50.000.000,00 | | 6 jenis | | 80.000.000,00 | | 39 jenis | | 344.247.519,00 | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | - | | - | | | - | | - | | 2 media | | 10.000.000,00 | | 2 media | | 10.000.000,00 | | 2 media | | 10.000.000,00 | | 2 media | | 50.000.000,00 | | 8 media | | 80.000.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.06.09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 54 kali | | 253.066.000,00 | | | 15 kali | | 100.000.000,00 | | 15 kali | | 100.000.000,00 | | 15 kali | | 100.000.000,00 | | 15 kali | | 100.000.000,00 | | 15 kali | | 300.000.000,00 | | 129 kali | | 953.066.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.01.2.03** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional** | | - | | **-** | | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | **5 unit** | | **100.000.00,000** | | - | | **-** | | - | | **-** | | **5 unit** | | **100.000.000,00** | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.03.20 | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.03.21 | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan Roda 4 | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Roda 4) | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.03.22 | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan Roda 2 | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Roda 2) | | - | | - | | | - | | - | |  | | - | | 5 unit | | 100.000.000,00 | | - | | - | | - | | - | | 5 unit | | 100.000.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.01.2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang** | | **4 dok** | | **1.538.234.550,00** | | | **4 dok** | | **1.618.443.600,00** | | **4 dok** | | **1.613.325.605,00** | | **4 dok** | | **1.717.898.529,00** | | **4 dok** | | **1.814.756.204,00** | | **4 dok** | | **2.044.459.136,00** | | **72 dok** | | **10.347.117.624,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.08.01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 630 lbr | | 6.930.000,00 | | | 630 lbr | | 6.930.000,00 | | 630 lbr | | 6.930.000,00 | | 630 lbr | | 6.930.000,00 | | 630 lbr | | 6.930.000,00 | | 630 lbr | | 8.630.000,00 | | 3.780 lbr | | 43.280.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.08.02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 12 bln | | 472.200.000,00 | | | 12 bln | | 472.200.000,00 | | 12 bln | | 470.400.000,00 | | 12 bln | | 470.400.000,00 | | 12 bln | | 470.400.000,00 | | 12 bln | | 470.400.000,00 | | 72 bln | | 2.826.000.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.08.04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 12 bln | | 1.059.104.550,00 | | | 12 bln | | 1.1139.313.600,00 | | 12 bln | | 1.135.995.605,00 | | 12 bln | | 1.240.568.529,00 | | 12 bln | | 1.337.426.204,00 | | 12 bln | | 1.565.429.136,00 | | 72 bln | | 7.477.837.624,00 | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | Jasa Tenaga Kebersihan | | Jumlah Tenaga Kebersihan yang Disediakan | | 3 orang | | 122.395.614,00 | | | 3 orang | | 122.395.614,00 | | 3 orang | | 122.395.614,00 | | 3 orang | | 122.395.614,00 | | 3 orang | | 122.395.614,00 | | 3 orang | | 122.395.614,00 | | 18 orang | | 734.373.684,00 | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran | | Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran yang Disediakan | | 31 orang | | 936.708.936,00 | | | 37 orang | | 1.016.917.986,00 | | 37 orang | | 1.013.599.991,00 | | 37 orang | | 1.118.172.915,00 | | 37 orang | | 1.215.030.590,00 | | 37 orang | | 1.443.033.522,00 | | 216 orang | | 6.743.463.940,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.01.2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang** | | **4 dok** | | **781.753.600,00** | | | **2 dok** | | **267.500.000,00** | | **2 dok** | | **267.500.000,00** | | **2 dok** | | **267.500.000,00** | | **2 dok** | | **267.500.000,00** | | **2 dok** | | **375.000.000,00** | | **14 dok** | | **2.226.753.600,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.09.09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 12 bulan | | 417.170.000,00 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 100.000.000,00 | | 12 bulan | | 517.170.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.09.02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 23 unit | | 263.433.600,00 | | | 22 unit | | 200.000.000,00 | | 22 unit | | 200.000.000,00 | | 22 unit | | 200.000.000,00 | | 22 unit | | 200.000.000,00 | | 22 unit | | 200.000.000,00 | | 133 unit | | 1.263.433.600,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.01.2.09.06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lannya yang Dipelihara | | 28 unit | | 101.150.000,00 | | | 20 unit | | 67.500.000,00 | | 20 unit | | 67.500.000,00 | | 20 unit | | 67.500.000,00 | | 20 unit | | 67.500.000,00 | | 20 unit | | 75.000.000,00 | | 128 unit | | 446.150.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.02** | | **Program : PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | **Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)** | | **1.394.557. 147.530** | | **331.482.623,00** | | | **1.422.448.290.481** | | **330.000.000,00** | | **1.450.897.256.291** | | **350.000.000,00** | | **1.487.169. 687. 698** | | **360.500.000,00** | | **1.531.784. 778. 329** | | **371.315.000,00** | | **1.585. 397 .245. 570** | | **382.454.450,00** | | **8.872. 254. 405. 898,53** | | **2.125.752.073,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | **2.18.02.2.01** | | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang tersusun** | | **1 dok** | | **331.482.623,00** | | | **1 dok** | | **175.000.000,00** | | **1 dok** | | **350.000.000,00** | | **1 dok** | | **240.500.000,00** | | **1 dok** | | **371.315.000,00** | | **1 dok** | | **262.454.450,00** | | **6 dok** | | **1.730.752.073,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | 2.18.02.2.01.01 | | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | 1 dok | | 331.482.623,00 | | | 1 dok | | 175.000.000,00 | | 1 dok | | 350.000.000,00 | | 1 dok | | 240.500.000,00 | | 1 dok | | 371.315.000,00 | | 1 dok | | 262.454.450,00 | | 6 dok | | 1.730.752.073,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.02.2.02** | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | | **Jumlah dokumen potensi investasi yang dibuat** | |  | | **-** | | | **2 dok** | | **155.000.000,00** | |  | | **-** | | **2 dok** | | **120.000.000,00** | |  | | **-** | | **2 dok** | | **120.000.000,00** | | **6 dok** | | **395.000.000,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | 2.18.02.2.02.01 | | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM) Kab/Kota | | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | |  | | - | | | 1 dok | | 80.000.000,00 | |  | | - | | 1 dok | | 70.000.000,00 | |  | | - | | 1 dok | | 70.000.000,00 | | 3 dok | | 220.000.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.02.2.02.02 | | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota | | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | |  | | - | | | 1 dok | | 75.000.000,00 | |  | | - | | 1 dok | | 50.000.000,00 | |  | | - | | 1 dok | | 50.000.000,00 | | 3 dok | | 175.000.000,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.03** | | **Program : PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | **Peningkatan Jumlah Investor** | | **1** | | **410.454.287,00** | | | **2** | | **356.850.650,00** | | **2** | | **500.000.000,00** | | **2** | | **515.000.000,00** | | **2** | | **530.450.000,00** | | **2** | | **546.363.500,00** | | **11** | | **2.859.118.437,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | **2.18.03.2.01** | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah pengunjung yang minat investasi** | | **75 orang** | | **410.454.287,00** | | | **70 orang** | | **356.850.650,00** | | **95 orang** | | **500.000.000,00** | | **100 orang** | | **515.000.000,00** | | **125 orang** | | **530.450.000,00** | | **150 orang** | | **546.363.500,00** | | **615 orang** | | **2.859.118.437,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | 2.18.03.2.01.01 | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | |  | | - | | |  | | - | | 1 lap | | 135.000.000,00 | | 1 lap | | 139.050.000,00 | | 1 lap | | 143.221.500,00 | | 1 lap | | 147.518.145,00 | | 4 lap | | 564.789.645,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.03.2.01.02 | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | | 2 event | | 410.454.287,00 | | | 2 event | | 356.850.650,00 | | 2 event | | 365.000.000,00 | | 3 event | | 375.950.000,00 | | 4 event | | 387.228.500,00 | | 7 event | | 398.845.355,00 | | 20 event | | 2.294.328.792,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.04** | | **Program : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM**) | | **86.30** | | **136.915.159,00** | | | **81.12** | | **327.566.401,00** | | **78.20** | | **400.000.000,00** | | **79.50** | | **412.000.000,00** | | **83.00** | | **424.360.000,00** | | **86.30** | | **437.090.800,00** | | **86.30** | | **2.137.932.360,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | **2.18.04.2.01** | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan** | | **3 dok** | | **136.915.159,00** | | | **4 dok** | | **327.566.401,00** | | **5 dok** | | **400.000.000,00** | | **6 dok** | | **412.000.000,00** | | **7 dok** | | **424.360.000,00** | | **8 dok** | | **437.090.800,00** | | **33 dok** | | **2.137.932.360,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | 2.18.04.2.01.01 | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | 1 aplikasi | | 20.352.411,00 | | | 1 aplikasi | | 50.000.000,00 | | 1 aplikasi | | 115.000.000,00 | | 1 aplikasi | | 118.450.000,00 | | 1 aplikasi | | 122.003.500,00 | | 1 aplikasi | | 125.663.605,00 | | 6 aplikasi | | 551.469.516,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.04.2.01.02 | | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | | Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal | | 1 dok | | 28.941.748,00 | | | 1 dok | | 77.750.000,00 | | 1 dok | | 80.500.000,00 | | 1 dok | | 82.915.000,00 | | 1 dok | | 85.402.450,00 | | 1 dok | | 87.500.000,00 | | 6 dok | | 443.009.198,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.04.2.01.03 | | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | | 3 laporan | | 43.024.000,00 | | | 3 laporan | | 150.000.000,00 | | 3 laporan | | 154.500.000,00 | | 3 laporan | | 159.135.000,00 | | 3 laporan | | 163.909.050,00 | | 3 laporan | | 168.927.195,00 | | 18 laporan | | 839.495.245,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.04.2.01.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah | | Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif | | - | | - | | | - | |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.04.2.01.05 | | Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Layanan Perizinan | | Jumlah Laporan MONEV Layanan Perizinan dan Nonperizinan yang dibuat | | 3 laporan | | 44.597.000,00 | | | 5 laporan | | 49.816.401,00 | | 7 laporan | | 50.000.000,00 | | 9 laporan | | 51.500.000,00 | | 11 laporan | | 53.045.000,00 | | 13 laporan | | 55.000.000,00 | | 48 laporan | | 303.958.401,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.05** | | **Program : PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | **Persentase Ketaatan Perusahaan terhadap Aturan Penanaman Modal** | | **35,34%** | | **516.037.347,00** | | | **37,50%** | | **190.121.000,00** | | **44,44%** | | **200.000.000,00** | | **50%** | | **206.000.000,00** | | **55%** | | **212.180.000,00** | | **57%** | | **218.545.400,00** | | **57%** | | **1.542.883.747,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | **2.18.05.2.01** | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah** | | **480 LKPM** | | **516.037.347,00** | | | **480 LKPM** | | **190.121.000,00** | | **480 LKPM** | | **200.000.000,00** | | **480 LKPM** | | **206.000.000,00** | | **480 LKPM** | | **212.180.000,00** | | **480 LKPM** | | **218.545.400,00** | | **2.880 LKPM** | | **1.542.883.747,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | 2.18.05.2.01.01 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | | 40 | | 74.597.620,00 | | | 40 | | 69.452.656,00 | | 40 | | 70.000.000,00 | | 40 | | 72.100.000,00 | | 40 | | 73.590.000,00 | | 40 | | 75.797.700,00 | | 240 | | 435.537.976,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.05.2.01.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | | 350 | | 351.318.352,00 | | | 250 | | 85.000.000,00 | | 260 | | 90.000.000,00 | | 270 | | 92.700.000,00 | | 280 | | 93.590.000,00 | | 300 | | 96.397.700,00 | | 1.710 | | 809.006.052,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | 2.18.05.2.01.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | | 40 | | 90.121.375,00 | | | 40 | | 35.668.344,00 | | 40 | | 40.000.000,00 | | 40 | | 41.200.000,00 | | 40 | | 45.000.000,00 | | 40 | | 46.350.000,00 | | 240 | | 298.339.719,00 | | |  | | | | |
|  | |  | | **2.18.06** | | **Program : PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | **Persentase Ketersediaan Data Perizinan** | | **100%** | | **262.327.959,00** | | | **100%** | | **175.000.000,00** | | **100%** | | **300.000.000,00** | | **100%** | | **309.000.000,00** | | **100%** | | **318.270.000,00** | | **100%** | | **327.818.100,00** | | **100%** | | **1.692.416.059,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | **2.18.06.2.01** | | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah dokumen pemenuhan permintaan data perizinan dan non perizinan** | | **1 dok** | | **262.327.749,00** | | | **1 dok** | | **175.000.000,00** | | **1 dok** | | **300.000.000,00** | | **1 dok** | | **309.000.000,00** | | **1 dok** | | **318.270.000,00** | | **1 dok** | | **327.818.100,00** | | **6 dok** | | **1.692.416.059,00** | | | **DPMPTSP** | | | | |
|  | |  | | 2.18.06.2.01.01 | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | | 500 izin | | 262.327.749,00 | | | 500 izin | | 175.000.000,00 | | 550 izin | | 300.000.000,00 | | 560 izin | | 309.000.000,00 | | 570 izin | | 318.270.000,00 | | 580 izin | | 327.818.100,00 | | 3.260 izin | | 1.692.415.849,00 | | |  | | | | |
| **TOTAL PAGU ANGGARAN** | | | | | | | | | |  | | **12.431.759.466,00** | | |  | | **11.400.000.000,00** | |  | | **11.870.666.568,00** | |  | | **12.024.373.234,00** | |  | | **12.180.666.967,00** | |  | | **12.855.809.735,00** | |  | | **72.763.275.970,00** | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Bontang, Agustus 2021 | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Pengguna Anggaran, | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | NIP. 19610912 198903 1 011 | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL**

Indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang telah dicanangkan pada awal periode Renstra. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah dapat dicapai.

* 1. **Penentuan Indikator Kinerja**

Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatannya maka ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja perangkat daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator kinerja memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja ada yang berdampak langsung, tetapi sebagian lainnya merupakan dampak tidak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri dari indikator-indikator:

1. ***Exact :*** ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.
2. ***Proxy :*** indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.
3. ***Activity :*** indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya dan waktu dari kegiatan - kegiatan yang berdampak pada Sasaran strategis yang bersangkutan.

Dalam penetapan Indikator kinerja daerah berpedoman pada permendagri 54 tahun 2010 serta memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat, tantangan dan hambatan yang ada serta kondisi eksisting pencapaian indikator sebelumnya. Hal ini menjadi pertimbangan, karena apa yang akan dicapai tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan intern

perangkat daerah, partisipasi masyarakat, potensi yang dimiliki oleh daerah serta semangat dan loyalitas aparatnya yang tercermin dari komitmen bersama antara pimpinan dan birokrasi dalam menentukan indikator kinerja.

* 1. **Indikator Kinerja DPMPTSP**

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja perangkat daerah sekaligus sebagai acuan penyusunan Renja perangkat daerah, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada Renstra ini. Indikator kinerja ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2021 sampai 2026.

Penetapan indikator kinerja DPMPTSP yang mengacu pada Sasaran dan Tujuan RPJMD selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 7.1**

Tabel Penetapan Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Bontang yang Mengacu

Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026 (REVIU)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH** | **SATUAN** | **KONDISI AWAL KINERJA RPJMD (2020/2021)** | **TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -** | | | | | **KONDISI AKHIR RPJMD** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 14 | PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| 14.1 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) | Investor | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 |
| 14.2 | Jumlah Investor Berskala Asing (PMA) | Investor | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14.3 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) Rp. X (000.000) | Juta (Rp.) | 963.381,05 | 760.000,00 | 775.200,00 | 794.580,00 | 818.417,40 | 847.062,01 | 847.062,01 |
| 14.4 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA)  $ X (000) | ($) | 325.558,24 | 136.986,30 | 139.726,03 | 143.219,18 | 147.515,75 | 152.678,80 | 152.678,80 |
|  | | Triliyun (Rp.) | 4.753.150,34 | 2.000.000,00 | 2.040.000,00 | 2.885.580,00 | 2.972.147,40 | 3.076.172,56 | 3.076.172,56 |
| 14.5 | Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) | Triliyun (Rp.) | 1.394.557,15 | 1.422.448,29 | 1.450.897,26 | 1.487.169,69 | 1.531.784,78 | 1.585.397,25 | 1.585.397,25 |
| 14.6 | Nilai IKM | Nilai | 86.30 | 81.12 | 78.20 | 79.50 | 83.00 | 86.30 | 86.30 |
| 14.7 | Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal | Persen | 35,34 | 37,50 | 44,44 | 50,00 | 55,00 | 57,00 | 57,00 |
| 14.8 | Prosentase Ketersediaan Data Perizinan | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Nilai realisasi IKM Tahun 2020 = 86,30

\*) Target IKM 2022 = 81,12

(Aplikasi OSS RBA, PBG dan PD)

**Tabel 7.2**

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2021 – 2026 (REVIU)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **INDIKATOR** | **SATUAN** | **BASELINE (2020/201)** | **TARGET CAPAIAN PADA TAHUN** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) | Investor | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 2. | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA) | Investor | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) Rp. X (000.000) | Juta (Rp.) | 963.381,05 | 760.000,00 | 775.200,00 | 794.580,00 | 818.417,40 | 847.062,01 |
| 4. | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA) $ X (000) | ($) | 325.558,24 | 136.986,30 | 139.726,03 | 143.219,18 | 147.515,75 | 152.678,80 |
|  | | Triliyun (Rp.) | 4.753.150,34 | 2.000.000,00 | 2.040.000,00 | 2.885.580,00 | 2.972.147,40 | 3.076.172,56 |
| 5. | Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) | Triliyun (Rp.) | 1.394.557,15 | 1.422.448,29 | 1.450.897,26 | 1.487.169,69 | 1.531.784,78 | 1.585.397,25 |
| 6. | Nilai IKM | Nilai | 86.30 | 81.12 | 78.20 | 79.50 | 83.00 | 86.30 |

Catatan :

\*) Target nilai investasi PMA =

\*\*) Target nilai realisasi investasi PMDN 2023 = Rp. 2.127.278.573.765,00 (Revisi)

Pengukuran Indikator - Indikator Kinerja di atas dilakukan dengan cara Perhitungan Sesuai Data yang ada pada Tabel berikut ini :

**Tabel 7.3**

Tabel Pengukuran Indikator - Indikator Kinerja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bidang Urusan Wajib : Penanaman Modal | |
| 1.1 | Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN) x Rp. (000.000,-) | = Jumah nilai investasi tahun (n) – Jumlah nilai investasi tahun (n-1)  Jumlah nilai investasi tahun (n-1) di Kota X 100%  = Jumlah nilai investasi tahun (n) – Jumlah nilai investasi tahun (n-1)  Jumlah nilai investasi tahun (n-1) di Kota X 100% |
| 1.2 | Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA) x $ (000,-) |
| 1.3 | Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | = Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN) Per Tahun |
| 1.4 | Peningkatan Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | = Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) Per Tahun |
| 1.5 | Nlai Indeks Kepuasan = Masyarakat (IKM) |  |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2021-2026 harus dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang Tahun 2021-2024.

3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kota Bontang, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahapan selanjutnya.

Dukungan partisipasif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi guna membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan Kota Bontang.

Bontang, 24 Nopember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196708201998031008

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Tanggal** | **Paraf** |
| 1 | Syahrul, S.Pd | Sekretaris |  |  |
| 2 | Adriani, SE | Kasubbag. Perencanaan |  |  |

LAMPIRAN

**Tabel 8.1**

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

**KOTA BONTANG TAHUN 2021 – 2026 (RPJMD) REVISI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | **Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna** | **Indikator Kinerja Program (outcome)** | **Satuan** | **Baseline** | | **Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Perangkat Daerah Penanggung Jawab** |
| **Tahun 2021** | | **Tahun 2022** | | **Tahun 2023** | | **Tahun 2024** | | **Tahun 2025** | | **Tahun 2026** | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD** | |
| **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** |
| (1) | | | (2) | (3) |  |  | (4) | (5) |  |  | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **2** | **18** |  | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** |  |  |  | **12.431.759.466** |  | **11.400.000.000** |  | **11.870.666.568** |  | **12.024.373.234** |  | **12.180.666.967** |  | **12.855.809.735** |  | **72.763.275.970** | **DPMPTSP** |
| 2 | 18 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah | persen | 100% | 10.774.542.301,- | 100% | 10.020.461.949,- | 100% | 10.120.666.568,- | 100% | 10.221.873.234,- | 100% | 10.324.091.967,- | 100% | 10.943.537.485,- | 100% | 62.405.173.504,- | DPMPTSP |
| 2 | 18 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Nilai Realisasi Investasi | Juta Rp | 1.394.557,15 | 331.482.623,- | 1.422.448, 29 | 330.000.000,- | 1.450.897, 26 | 350.000.000,- | 1.487.169, 69 | 360.500.000,- | 1.531. 784,78 | 371.315.000,- | 1.585.397, 25 | 382.454.450,- | 8.872. 254,41 | 2.125.752.073,- |
| 2 | 18 | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Peningkatan Jumlah Investor | Investor | 1 | 410.454.287,- | 2 | 356.850.650,- | 2 | 500.000.000,- | 2 | 515.000.000,- | 2 | 530.450.000,- | 2 | 546.363.500,- | 11 | 2.859.118.437,- |
| 2 | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Nilai IKM | Nilai | 86.30 | 136.915.159,- | 81.12 | 327.566.401,- | 78.20 | 400.000.000,- | 79.50 | 412.000.000,- | 83.00 | 424.360.000,- | 86.30 | 437.090.800,- | 86.30 | 2.137.932.360,- |
| 2 | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Prosentase Ketaatan Perusahan Terhadap Aturan Penanaman Modal | Persen | 35,34 | 516.037.347,- | 37,50 | 190.121.000,- | 44,44 | 200.000.000,- | 50,00 | 206.000.000,- | 55,00 | 212.180.000,- | 57,00 | 218.545.400,- | 57,00 | 1.542.883.747 |
| 2 | 18 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase ketersediaan data perizinan | Persen | 100% | 262.327.749,- | 100% | 175.000.000,- | 100% | 300.000.000,- | 100% | 309.000.000,- | 100% | 318.270.000,- | 100% | 327.818.000,- | 100% | 1.692.415.749,- |